



Kemendikdasmen
BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

2025



bbppmpvbispar.kemdikbud



bbppmpvbispar.kemendikdasmen



bbppmpv_bispar



bbppmpv_bispar



0878 8999 2223
(chat only)

bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bisnis dan Pawisata) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan.



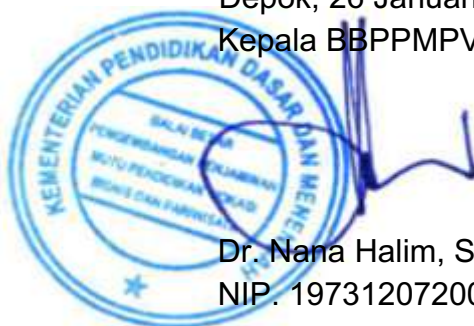
Penyusunan Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Di dalam Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata tersaji informasi mengenai capaian kinerja, analisis atas keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi, serta langkah strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata. Harapan kami, Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pawisata bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi rujukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Depok, 26 Januari 2026

Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



Dr. Nana Halim, S.E., M.M.

NIP. 197312072002121001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I	
PENDAHULUAN	8
A. Gambaran Umum	8
B. Dasar Hukum	12
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	13
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan	15
E. Peran Strategis	15
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Program Prioritas 2025-2029	18
D. Perjanjian Kinerja	19
BAB III	
A. Akuntabilitas Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	60
C. Kinerja Lain-lain	66
BAB IV	
PENUTUP	75
LAMPIRAN	79
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)	80
Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)	82
Lampiran 3: Rencana Aksi Tahun 2025	84
Lampiran 4: Laporan Kinerja Triwulan 1	86
Lampiran 5: Laporan Kinerja Triwulan 2	92
Lampiran 6: Laporan Kinerja Triwulan 3	98
Lampiran 7: Laporan Kinerja Triwulan 4	103

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi
2. Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Melalui perumusan tujuan ini, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berupaya memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola dapat memberikan hasil (outcome) yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, satuan kerja telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan berbasis kinerja yang semakin berkualitas, pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, satker telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja. Capaian Tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun berikutnya

Tujuan strategis BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yaitu :

1. Peningkatan mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi;
2. Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dua ketercapaian tujuan strategis tersebut dicapai dengan dua (2) sasaran strategis, dicapai melalui lima (5) indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tabel 1. Indikator Tujuan Strategis dan Target

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target 2025
SK.1 Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi			
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36 %
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi	2
SK.2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata			
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat Baik
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A

Adapun ketercapaiannya sampai tahun berjalan baik SK.1 dan SK.2 telah mencapai 100% , bahkan untuk SK.1 IKK.1 dan 2 telah Mencapai lebih dari 100%.

Sepanjang tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan sumber daya untuk mendukung prioritas nasional, prioritas Kementerian, serta agenda transformasi pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2. Tujuan Strategis, Taget dan Capaian Tahun 2025

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
SK.1 Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi					
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36	23,14	103
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	787	107
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi/ Model	2	2	100
SK.2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis					
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat Baik	sangat baik	100
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	A	100

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif dari total sebanyak 80% berhasil mencapai Target dan 20 % melampaui Capaian dari target. ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Berikut gambar ringkasan capaian kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025.



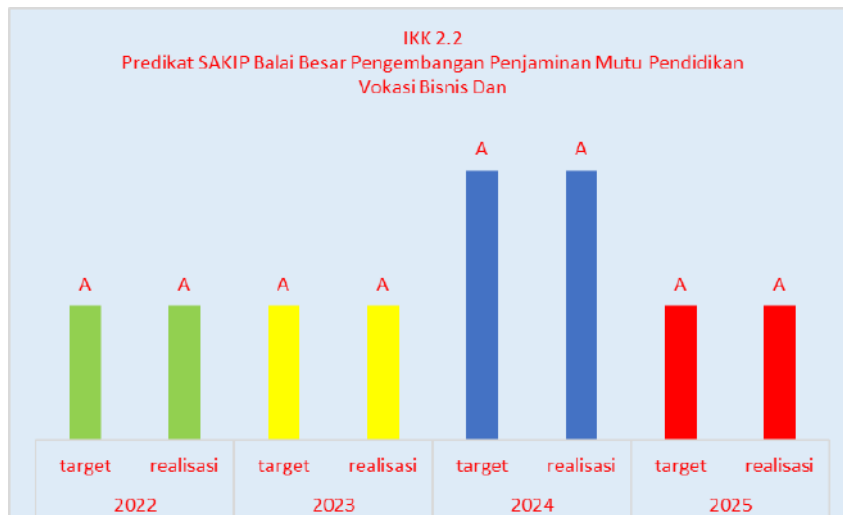
Gambar 1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja



Gambar 2. Jumlah satuan Pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan



Gambar 3. Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja



Gambar 4. Predikat SAKIP BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

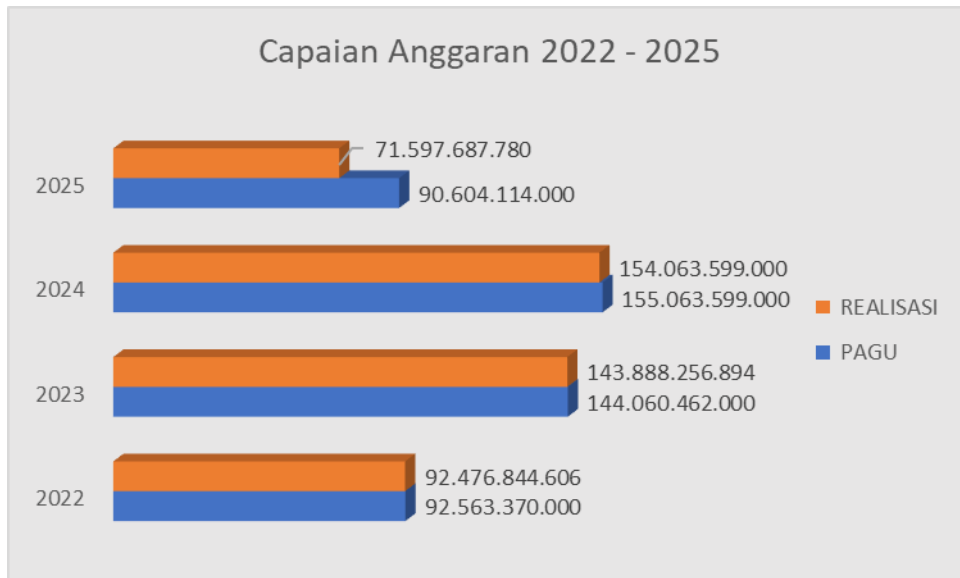


Gambar 5. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BBPMPV Bisnis dan Pariwisata



Gambar 6. Capaian Anggaran BBPMPV Bisnis dan Pariwisata

Berikut alokasi anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dari tahun 2022 - 2025



Gambar 7. Capaian anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2022-2025

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami penurunan, hal tersebut seiring dengan penurunan target/sasaran program prioritas BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Untuk TA 2025 Pagu akhir berjumlah Rp. 90.604.114.000 dengan Blokir A sejumlah Rp. 19.005.221.000 sehingga Pagu tanpa Blokir berjumlah Rp. 71.598.893.000, dengan Realisasi Rp. 71.597.687.780 sehingga Penyerapan Mencapai 100%.

Selama tahun 2025 terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah widyaiswara berdampak pada beban kerja tinggi dan belum optimalnya cakupan serta kualitas layanan pengembangan kompetensi guru vokasi.
2. Masih banyak guru vokasi yang belum terjangkau program diklat akibat keterbatasan sumber daya, anggaran, waktu pelaksanaan, dan kapasitas layanan pelatihan.
3. Sebaran wilayah binaan DKI Jakarta dan Kalimantan yang luas dan beragam secara geografis menyulitkan koordinasi, distribusi layanan, serta pemerataan peningkatan mutu pendidikan vokasi

4. Dengan adanya Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran, anggaran DIPA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam Blokir A sebesar Rp. 19.005.221.000 sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
5. Kurang koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan SMK dan guru SMK di wilayahnya, sehingga informasi terkait program pelatihan belum merata.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang ada, antara lain:

1. Mengundang Narasumber Praktisi, Industri dan professional untuk memenuhi kekurangan pengajar widyaiswara dan juga memberikan peserta pelatihan materi dari narasumber ahli.
2. Melakukan Pemetaan data guru SMK bidang Bisnis dan Pariwisata seluruh Indonesia, untuk pemerataan peningkatan kompetensi Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata
3. Mengatur Strategis Pelatihan dalam efesiensi anggaran, dengan sharing budget agar pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi Guru SMK tetap berjalan maksimal dan terpenuhi semua target tahun 2025.
4. Intens berkordinasi dan Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dalam memenuhi target Program Prioritas Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata agar dapat menjangkau seluruh pelosok negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Secara umum, kondisi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 menunjukkan kesiapan kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya yang mendukung terwujudnya tata kelola pendidikan dasar dan menengah yang lebih berkualitas. Hal ini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

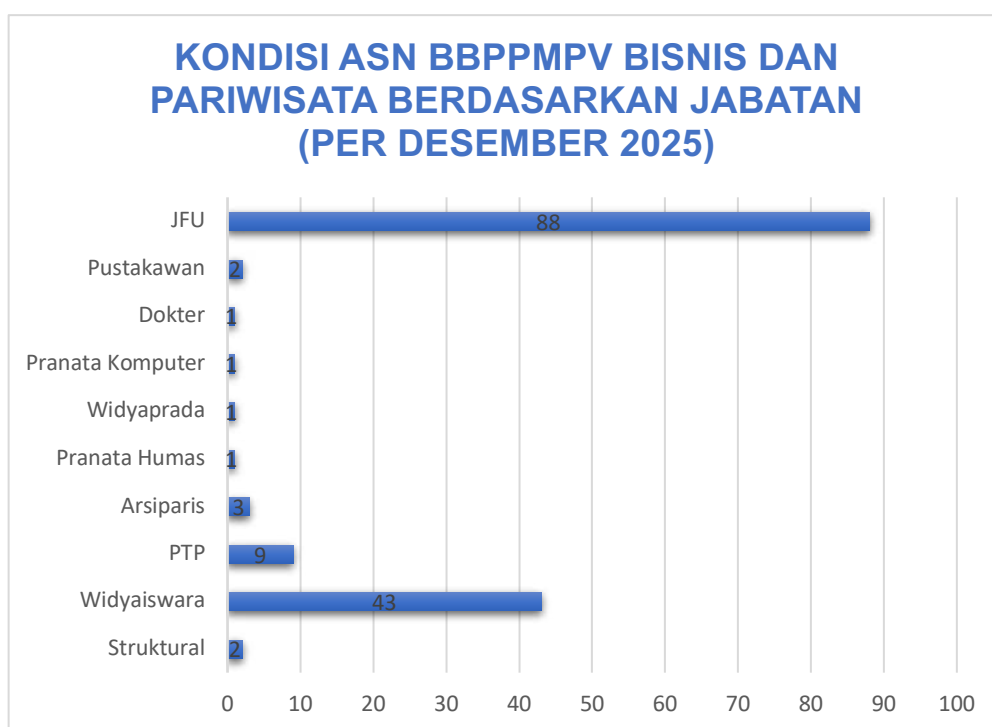
Struktur organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata terdiri dari unsur pimpinan, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang berfungsi memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh unsur bekerja secara sinergis dalam rangka mencapai sasaran strategis Renstra 2025–2029, khususnya terkait peningkatan mutu layanan pendidikan, efektivitas tata kelola, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, terdiri dari aparatur dengan kompetensi beragam, baik fungsional maupun struktural. Upaya peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis hasil. Budaya kerja berintegritas, adaptif, dan kolaboratif terus ditumbuhkan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Tematik dan penguatan nilai ASN BerAKHLAK.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pertama kali dibentuk tahun 1962, dengan nama awal Pusat

Pengembangan Penataran Guru Kejuruan (PPPGK). Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 8 tahun 2007 PPPG Kejuruan berganti nama menjadi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata. Kemudian pada tahun 2020, sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 26 tahun 2020, PPPPTK Bisnis Pariwisata berganti nama menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Sejak 1 Juni 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dipimpin oleh Dr Nana Halim, S.E., M.M.. Jumlah SDM sebanyak 151 ASN . BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mempunyai wilayah kerja seluruh Provinsi Di Republik Indonesia.

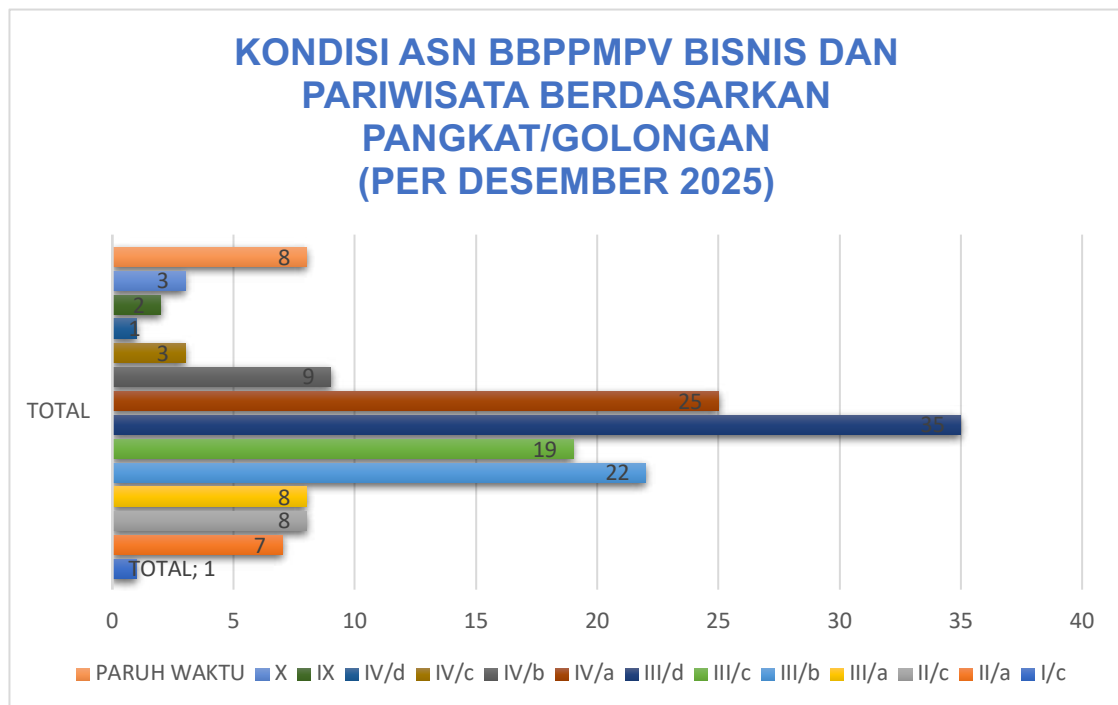
Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kondisi ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata saat ini memiliki jumlah ASN sebanyak 151 orang yang terdiri dari 138 PNS, 5 PPPK serta 8 PPPK Paruh Waktu.



Gambar 8. Kondisi ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Berdasarkan Jabatan (Per Desember 2025)

Tabel 3. Jabatan ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Jabatan	Jumlah
Struktural	2
Widyaiswara	43
PTP	9
Arsiparis	3
Pranata Humas	1
Widyaprada	1
Pranata Komputer	1
Dokter	1
Pustakawan	2
JFU	88



Gambar 9. Kondisi ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Berdasarkan Pangkat/Golongan (Per Desember 2025)

Tabel 4. Data Jumlah ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan Pangkat/Golongan

PANGKAT/GOLONGAN	TOTAL
I/c	1
II/a	7
II/c	8
III/a	8
III/b	22
III/c	19
III/d	35
IV/a	25
IV/b	9
IV/c	3
IV/d	1
IX	2
X	3
PARUH WAKTU	8

**KONDISI ASN BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
(PER DESEMBER 2025)**



Gambar 10. Kondisi ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Berdasarkan Jenis Kelamin (Per Desember 2025)

Tabel 5. Data Jumlah ASN BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	Wanita
80	71

Pada tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan pengembangan karir pegawai (uji kompetensi kenaikan jenjang), pengusulan penghargaan Satyalancana Karyasatya, pencantuman gelar dan promosi pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Data Pegawai yang Melaksanakan Pengembangan Karir.

No.	Keterangan	Total
1	Satyalancana	28
2	Ujikom WI	9
3	Ujikom PTP	4
4	Ujikom Perencana	1
5	Ujikom Arsiparis	1
6	Pencantuman Gelar	7
7	Kenaikan Kelas Jabatan	12

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk UPT daerah;

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melaksanakan tugas sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

”Melaksanakan pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata”

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
2. Pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. Pelaksanaan penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
5. Pengelolaan data dan informasi;
6. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi;
7. Pelaksanaan evaluasi pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur Organisasi

Gambarkan Struktur Organisasi sesuai OTK unit kerja



Gambar 11. Struktur Organisasi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

Paradigma Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang tentu mempunyai posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dengan adanya keterlibatan aktif dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pendidikan vokasi harus dapat membangunkan kesadaran pelaku dunia usaha dan dunia industri untuk turut mengambil tanggung jawab lebih besar, serta wajib dikembangkan agar dapat mengisi lapangan kerja industri dengan profil lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan tinggi.

Paradigma Pendidikan Vokasi

Saat ini paradigma tersebut telah bergeser dengan dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu seorang peserta didik baik di SMK/Kursus/Pelatihan mengikuti proses pembelajaran (pola pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana, maupun pengembangan kompetensi SDM (Guru/Instruktur) harus mengikuti kebutuhan dunia industri, dan kemudian wajib mengikuti uji kompetensi yang telah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang relevan

Kebijakan Pendidikan Vokasi

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam implementasi landasan filosofis Pendidikan Vokasi mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional yang kemudian diturunkan menjadi strategi implementasi revitalisasi pendidikan vokasi. Strategi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pokok kerangka implementasi program dan kegiatan pembaruan Pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Vokasi, beserta seluruh jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Gambar 12. Permasalahan/Isu strategis

E. Peran Strategis

1. Berperan dalam pengembangan, fasilitasi dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan vokasi;
2. Berperan dalam pengembangan dan pelaksanaan penjaminan mutu peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola pendidikan vokasi;
3. Berperan dalam penyelarasan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
4. Berperan dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi peserta didik baik di SMK/Kursus/Pelatihan sesuai bidang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra), BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan arah kebijakan dan dasar penyelenggaraan program serta kegiatan selama periode 2025–2029. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan serta prioritas program yang menjadi pedoman dalam menetapkan target kinerja tahunan, termasuk target pada tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh target kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 merujuk pada indikator dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, sehingga capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Visi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun Renstra 2025-2029:

**“Menjadi Pusat Keunggulan untuk Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter
Pancasila dan bertaraf Internasional”**

Misi

1. Pusat Keunggulan.

Pusat Keunggulan (Center of Excellence) mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah lembaga yang memiliki keunggulan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga secara kreatif dan inovatif bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Keunggulan dimaksud dapat dijadikan inspirasi dan rujukan bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan SMK Bisnis dan Pariwisata;

2. Pendidikan Kejuruan yang Berkarakter Pancasila.

Pendidikan Kejuruan yang berkarakter mengandung makna dan mencerminkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mendorong, memotivasi, dan menginspirasi SMK Bisnis dan Pariwisata (termasuk Kesehatan dan Pekerjaan Sosial) untuk memahami pluralitas sosial dan keberagaman budaya, membentuk wawasan kebangsaan, budaya riset, inovasi, budaya produksi, tangguh melestarikan warisan budaya, apresiasi terhadap keragaman seni, dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;

3. Bertaraf Internasional.

Bertaraf internasional mengandung makna dan mencerminkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata mengacu dan berpegang pada ketentuan-ketentuan patokan baku ISO yang berlaku secara internasional, serta trend atau kecenderungan yang berkembang secara internasional. Think Globally and Act Locally.

Tujuan Strategis

Tabel 7. Tujuan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

KODE	TUJUAN BBPPMPV BISPAP
T1	Peningkatan mutu layanan dan relevansi pendidikan vokasi
T2	Penguatan sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Matriks Kinerja

Tabel 8. Matrik Kinerja 2025-2029

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi						
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36	35,73	49,11	62,48	75,86
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	998	1264	1530	1796
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi/ Kebijakan	2	2	5	6	7
SK.2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata						
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	AA	AA	AA	AA

B. Program Prioritas 2025-2029

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam mendukung program prioritas Kementerian melalui program program Pendidikan bermutu turut serta melaksanakan.

Adapun Program Prioritas yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, sebagai berikut:

Tabel 9. Program Prioritas BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

No	Nama Program Prioritas	Target 2025	Alokasi Anggaran 2025
1	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	2 Rekomendasi	252.773.000
2	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	16 Kesepakatan	490.459.000
3	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	733 Lembaga	4.903.076.000
4	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	809	4.041.858.000
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	1538	31.528.398.000
6	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	39	657.209.000

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Berikut ini adalah rencana kerja dan anggaran tahun 2025

Tabel 10. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	Satuan	Alokasi Anggaran 2025		
			Angka Dasar	Inisiatif Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6
SK.1	Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
IKK 1.1	Jumlah/persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	22,36%	36.227.465.000		36.227.465.000
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	733 Lembaga	4.903.076.000		4.903.076.000
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2 Rekomendasi/Model	252.773.000		252.773.000
SK.2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan				
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Sangat Baik	44.438.621.000		44.438.621.000
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	A			

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 11. Target Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2025-2029

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi						
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36	35,73	49,11	62,48	75,86
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	998	1264	1530	1796
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi/ Kebijakan	2	2	5	6	7
SK.2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata						
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	AA	AA	AA	AA

Tabel 12. Target PK dan Renstra BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata 2025 - 2029

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA	TARGET PK
1	SK.1 Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan Tenaga Kependidikan	[IKK 1.1] Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36%	22,36%
		[IKK 1.2]Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	733
		[IKK 1.3]Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi	2	2
2	SK .2 Meningkatnya tata kelola BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	A

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025.

Tabel 13. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2366
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	Predikat	A

Alokasi Anggaran

Tabel 14. Alokasi Anggaran

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp44.438.621.000
2	7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp43.132.617.000
Total Anggaran			Rp87.571.238.000

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 15. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Persen	22,36
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga	733
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Model	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	Predikat	A

Alokasi Anggaran

Tabel 16. Alokasi Anggaran 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp44.438.621.000
2	7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp46.165.493.000
Total Anggaran			Rp90.604.114.000

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata disusun sebagai penyesuaian atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, seiring terjadinya perubahan pada alokasi anggaran, penyesuaian Target Sesuai Renstra 2025 – 2029 pada IKK 1.1 dari jumlah menjadi persentase selama tahun berjalan.

Revisi Perjanjian Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja tetap realistis, terukur, dan selaras dengan prioritas strategis kementerian serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja revisi, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menegaskan kembali komitmen untuk mencapai sasaran kinerja yang telah diperbarui dan menjadikan dokumen ini sebagai dasar pengukuran capaian kinerja akhir tahun 2025.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025:

Untuk IKK.1.1 terdapat perbedaan jenis target PK dengan yang ada di Renstra 2025-2029 pada indikator yaitu untuk target PK Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sedang untuk target Renstra IKK.1.1 pada indikator tertulis Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia, perbedaan ini karena Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Baru ditetapkan di Bulan Oktober 2025, sehingga pada PK awal target masih dalam bentuk jumlah. Untuk Alokasi Anggaran adanya penambahan Anggaran dikarenakan adanya Revisi Pendapatan PNPB. Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 87.571.238.000 menjadi Rp. 90.604.114.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun berjalan, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melaksanakan pengelolaan kinerja melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan yang selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Capaian kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 diukur secara sistematis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, diverifikasi melalui reviu internal, dan dibandingkan dengan target tahunan.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melakukan analisis terhadap capaian yang belum optimal dan merumuskan langkah tindak lanjut sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Proses ini disertai penguatan integrasi perencanaan dan anggaran, peningkatan kualitas data kinerja, serta pengawasan intern untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 menunjukkan komitmen BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil. Upaya ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun berikutnya.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menetapkan 2 SK (Sasaran Kinerja) dengan 5 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) . Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2025

Tabel 17. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	%
[SK. 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja (persen)	2386 (22.36 %)	2685 (23.13 %)	103
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan (lembaga)	733	787	107
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja (rekomendasi kebijakan)	2	2	100
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (predikat)	A	A	100%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Sumber: SPAN dan Spasikita

Sasaran Kinerja

SK 1. Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi

Sasaran Kegiatan 1 berupa meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 3 Indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang realisasinya melebihi dari target, dan ada 1 indikator yang realisasinya sama dengan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut akan dijelaskan pada masing-masing indikator.

Tabel 17. Capaian Sasaran SK 1 Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja (persen)	2386 (22.36%)	2685 (23.13%)	103
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan (lembaga)	733	787	107
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja (rekomendasi kebijakan)	2	2	100

[IKK 1.1]	Jumlah/persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja
-----------	--

Definisi Operasional

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi adalah program peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan berfokus pada keahlian yang diajarkan di satuan pendidikan vokasi. Peserta program peningkatan kapasitas adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan vokasi baik negeri maupun swasta.

Lingkup pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas:

1. Pendidik satuan pendidikan vokasi adalah guru SMK, dan Instruktur Kursus dan Pelatihan; dan
2. Tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi adalah Kepala Sekolah, Pengelola LKP, pengawas, teknisi, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan vokasi.).

Program peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Vokasi terdiri atas pelatihan Upskilling dan Reskilling dan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*).

1. Pelatihan Upskilling adalah pelatihan berbasis industri bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya.
2. Program peningkatan kapasitas tersebut dilakukan oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerja sama dengan Dunia Kerja dan/atau Lembaga pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi teknis/kejuruan/kerja. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut mengacu pada juknis atau perdirjen terkait.
3. Pembelajaran Mendalam adalah konsep yang diperkenalkan untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada (seperti Kurikulum Merdeka) agar proses belajar-mengajar tidak hanya sekadar mengejar materi yang luas, tetapi lebih fokus pada penguasaan materi secara mendalam dan bermakna.

Pembelajaran Mendalam didefinisikan sebagai pendekatan yang menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui empat pilar utama pengembangan manusia:

- Olah Pikir: Mengasah akal budi dan kemampuan kognitif (analisis, pemecahan masalah).
- Olah Hati: Mengasah kepekaan batin, budi pekerti, nilai moral, dan spiritual.
- Olah Rasa: Mengembangkan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan.
- Olah Raga: Menjaga kesehatan fisik dan membentuk karakter melalui kegiatan jasmani.

Metode Perhitungan

$$e = \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$$

Keterangan:

e = Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

a = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja sejumlah 811 orang

b = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri sejumlah 1835 orang

c = Jumlah Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan sejumlah 39 orang

d = Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan vokasi sejumlah 40.967 orang (jumlah yang belum mendapatkan pelatihan)

Sehingga :

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas dan penyesuaian dengan kebutuhan dunia kerja adalah 2685 orang dengan rincian = 811 orang + 1835 orang + 39 orang . Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang belum mendapatkan pelatihan sejumlah 40.967 sehingga presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja adalah 23.14%

Tabel 18. Capaian Target dan Daya Serap Anggaran IKK 1.1 Tahun 2025

Kinerja			Anggaran			% Daya Serap
Target	Capaian	% Capaian	Alokasi	Blokir	Realisasi	
2386 (22.36%)	2685 (23.14%)	103	Rp 36.227.465.000	Rp 15.499.740.000	Rp 20.727.385.000	100

Sumber : SPAN dan Spasikita

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKK 1.1 telah melebihi target yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan telah dimanfaatkan secara maksimal dengan persentase daya serap berada di angka 100%. Pagu anggaran yang dialokasikan di awal adalah Rp 36.227.465.000 , namun karena adanya dana yang diblokir sebesar Rp 15.499.740.000, maka anggaran yang bisa digunakan adalah Rp 20.727.385.000. Hal ini juga membuktikan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 19. Realisasi IKK 1.1 Tahun Berjalan dibandingkan dengan Target Tahun Lalu dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian Akhir Renstra (2029)
Jumlah/presen tase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	4452 orang	4649 orang	2286 orang / 22.36%	2685 orang / 23.14%	24.282 orang / 75%	11.05%

Sumber : SPAN dan Spasikita

Tabel diatas menginformasikan bahwa pencapaian di tahun 2025 berhasil melebihi target tahunan dari 22,36% ke 23,14%. Mengingat target akhir di tahun 2029 cukup besar (75%), diperlukan konsistensi dan percepatan program di tahun-tahun mendatang untuk menutup celah sisa target di sasaran akhir

Renstra 2029. Hingga periode ini, total capaian terhadap target akhir Renstra 2029 berada di angka 11,05% . Angka 22.36% adalah target guru-guru yang dilatih di tahun 2025 dilihat dari jumlah guru yang belum dilatih oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Adapun rincian program dan kegiatan terkait yang mendukung pencapaian target kinerja IKK 1.1 presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja :

1. **Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja**

Pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran vokasi dan penguatan relevansi lulusan terhadap tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui pelatihan pembelajaran mendalam. Pelatihan ini mengintegrasikan pendekatan **Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)** yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, serta refleksi pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk diwujudkan dalam bentuk pengembangan *Project-Based Learning*, *Teaching Factory*, serta pembelajaran berbasis kasus industri.

Output yang dihasilkan:

- a. Peningkatan kompetensi guru kejuruan;
- b. **Tersusunnya perangkat pembelajaran berbasis industri**, meliputi modul ajar, RPP/ATP, serta bahan ajar kontekstual yang mengintegrasikan standar kompetensi industri ke dalam proses pembelajaran;
- c. **Pengembangan desain pembelajaran berbasis Pembelajaran Mendalam**, seperti *Project-Based Learning*, *Problem-Based Learning*, dan *Teaching Factory*, yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran autentik;
- d. **Meningkatnya kualitas praktik pembelajaran di kelas**, ditandai dengan penerapan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah, kolaborasi, dan refleksi

Pelatihan pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menyasar guru di wilayah DKI Jakarta dengan sasaran peserta sebanyak **809** dan realisasi hingga akhir kegiatan sebanyak **811** peserta. Dalam pelaksanaan pelatihan mendalam, secara garis besar **kendala utama** yang dihadapi mencakup keterbatasan pemahaman awal guru terhadap konsep kurikulum berbasis kebutuhan industri dan Pembelajaran Mendalam, sehingga membutuhkan waktu adaptasi dalam proses implementasi. Strategi untuk mengatasi kendala tersebut yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah melakukan **penguatan pendampingan dan *coaching***, melalui kegiatan bimbingan teknis lanjutan.



Gambar 13. Kegiatan Kurikulum Pembelajaran Mendalam

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang Mengikuti *Upskilling* dan *Reskilling* Berstandar Industri

Pelaksanaan pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar industri merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia vokasi dalam rangka menjawab tuntutan dunia kerja yang dinamis dan berbasis kompetensi. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesional peserta, baik guru kejuruan maupun tenaga kependidikan, agar selaras dengan standar industri serta perkembangan teknologi dan praktik kerja terkini.

Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* terbagi menjadi beberapa kegiatan. Berikut rinciannya:

a. Pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata

Peserta dalam pelatihan ini adalah Guru SMK Bidang Bisnis, Pariwisata dan Kesehatan yang sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan dari BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (Bispar). Pada Pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK, BBPPMPV Bispar berkolaborasi dengan satuan pendidikan sebagai pusat belajar untuk mendukung terselenggaranya kegiatan. Pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK dibagi menjadi 4 (empat) angkatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Pelaksanaan pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK

Angkatan	Periode Pelaksanaan	Sasaran	Realisasi
Angkatan 1	14 April s.d. 04 Juni 2025	222	179
Angkatan 2	14 Juli s.d. 21 Agustus 2025	400	387
Angkatan 3	27 Agustus s.d. 28 September 2025	275	268
Angkatan 4	03 s.d 11 November 2025	280	280

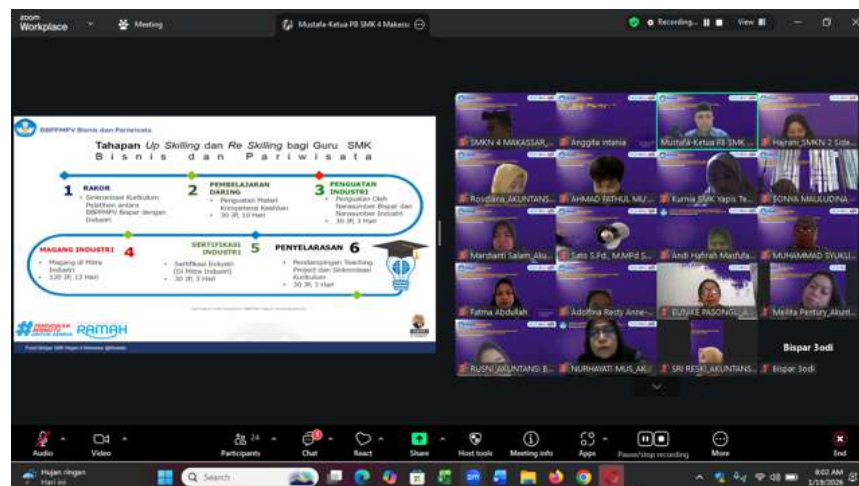
Dari rincian angkatan tersebut realisasi kegiatan adalah 1.114 peserta. Ketidaktercapaian jumlah peserta dalam setiap angkatan dikarenakan adanya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, sehingga terdapat penyesuaian strategi pelaksanaan pelatihan dengan sistem *sharing budget*.

Beberapa peserta merasa keberatan dan mengundurkan diri. Untuk mengatasi hal tersebut, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melaksanakan tambahan pelatihan yaitu:

1) Pelatihan *Teacher's Development Program In Collaboration* BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata *with L'Oréal Hairducation* dengan total peserta 22 orang

2) *Training of Trainers on French Cooking For Vocational Culinary Teachers 2025* dengan total peserta 44 orang

Dengan adanya tambahan 2 (dua) pelatihan, maka total realisasi kegiatan adalah 1180 peserta.



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata

b. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah

Pelatihan Manajerial bagi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan program pengembangan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan vokasi. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepala SMK dalam menjalankan peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran (*instructional leader*), manajer perubahan (*change leader*), serta penggerak kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pelatihan ini berhasil melatih sebanyak 68 (enam puluh delapan) dari 72 sasaran Kepala sekolah yang berasal dari 6 (enam) wilayah binaan BBPPMPV Bispar yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Manajerial Kepala Sekolah

c. Pelatihan Pengawas SMK

Pelatihan Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (Bispar) merupakan program penguatan kompetensi profesional pengawas dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan, pendampingan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali pengawas SMK dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik dan supervisi manajerial secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Pelatihan ini menyasar 49 (empat puluh sembilan) pengawas SMK di wilayah binaan BBPPMPV Bispar. Realisasi pada pelatihan ini adalah 54 (lima puluh empat) peserta.



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pengawas SMK

d. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNBPN

Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dibiayai melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan diselenggarakan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (Bispar) merupakan program layanan peningkatan kompetensi PTK sebagai bagian dari optimalisasi peran Bispar dalam memberikan layanan pengembangan profesional berkelanjutan kepada satuan pendidikan vokasi. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap tuntutan dunia kerja serta perkembangan kebijakan pendidikan vokasi. Sasaran pada pelatihan ini adalah 176 (seratus tujuh puluh enam). Realisasi pada pelatihan ini adalah 467 (empat ratus tujuh puluh enam) peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dari sasaran awal.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNBK

e. Pelatihan Guru Mata Pelajaran Umum

Pelatihan bagi Guru Mata Pelajaran Umum yang diselenggarakan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata merupakan program peningkatan kompetensi guru dalam rangka mendukung penguatan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran umum di satuan pendidikan vokasi, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran guru mapel umum sebagai bagian integral dalam pembentukan kompetensi dasar peserta didik, baik dari aspek literasi, numerasi, karakter, maupun keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pelatihan bagi Guru Umum ini dibagi menjadi beberapa mata pelajaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Rincian Pelaksanaan bagi Guru Umum

No	Nama Pelatihan	Periode Pelaksanaan	Sasaran	Realisasi
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Matematika Bagi Guru SMK	15 s.d. 21 Juni 2025	22	22
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru dalam Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial	15 s.d. 21 Juni 2025	22	22
3	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris	15 s.d. 21 Juni 2025	22	22



Gambar 18. Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Umum

3. Instruktur Kursus yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Industri Bidang keahlian Teknologi Terapan

Pelatihan bagi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan program peningkatan kompetensi profesional instruktur dalam rangka memperkuat mutu layanan pendidikan dan pelatihan vokasi nonformal. Pelatihan ini dirancang untuk membekali instruktur LKP dengan kemampuan pedagogik dan teknis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi kerja peserta didik. Pelatihan bagi instruktur LKP dibagi menjadi 2 (dua) kelas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Pelaksanaan Pelatihan bagi Instruktur LKP

No	Nama Pelatihan	Periode Pelaksanaan	Sasaran	Realisasi
1	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Bidang Administrasi Profesional	15 s.d. 21 Juni 2025	19	19
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Instruktur Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Bidang Kecantikan	15 s.d. 21 Juni 2025	20	20

Dari rincian kegiatan yang mendukung nilai ketercapaian IKK 1.1 Jumlah/persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, dapat disimpulkan bahwa realisasi kegiatan adalah 2685 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima) dari sasaran awal 2286 (dua ribu dua ratus delapan puluh enam) orang atau 103% dari sasaran awal.



Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan bagi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Keberhasilan capaian kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam melaksanakan berbagai pelatihan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung strategis yang berfungsi sebagai *enabler* dalam memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak. antara lain:

1. Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
Koordinasi dan sinergi yang kuat dengan Dinas Pendidikan Provinsi serta satuan pendidikan (SMK) membantu terlaksananya pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Guru SMK dalam menjangkau sasaran secara lebih luas dan tepat sesuai kebutuhan daerah.
2. Ketersediaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Internal
Kompetensi widyaiswara, fasilitator, dan tim teknis Bispar menjadi faktor fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan pelatihan. SDM yang memiliki pengalaman lapangan, kemampuan pedagogik, serta penguasaan teknologi pembelajaran memungkinkan proses pelatihan berlangsung secara profesional, adaptif, dan sesuai karakteristik peserta.
3. Dukungan Sistem dan Infrastruktur Pembelajaran
Keberadaan sistem pembelajaran digital seperti *Learning Management System* (LMS), platform konferensi daring, serta sarana prasarana pelatihan (kelas, laboratorium, teaching factory) menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pelatihan. Infrastruktur ini memungkinkan Bispar melaksanakan pelatihan dalam skala besar, lintas wilayah, dan tetap menjaga kualitas layanan.
4. Dukungan Kebijakan dan Regulasi
Kebijakan nasional terkait transformasi pendidikan vokasi memberikan legitimasi dan arah strategis bagi pelaksanaan pelatihan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Dukungan regulasi ini memperkuat posisi Bispar sebagai lembaga rujukan pengembangan kompetensi vokasi dan memperbesar dampak capaian kinerja institusi.

Dalam pelaksanaannya, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata juga menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja antara lain:

1. Adanya Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
2. Keterbatasan ketersediaan peserta sesuai sasaran. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan ketersediaan peserta yang sesuai

dengan kriteria sasaran pelatihan, khususnya kepala SMK, pengawas, dan guru produktif. Beban kerja di satuan pendidikan seringkali menyebabkan calon peserta kesulitan mengikuti pelatihan secara penuh, sehingga berdampak pada tingkat kehadiran, partisipasi, dan efektivitas pencapaian target pelatihan.

3. Keterbatasan jaringan internet dan perangkat TIK, terutama di daerah 3T, menghambat efektivitas pelatihan

Langkah - langkah antisipasi yang dilakukan adalah

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan dengan sistem sharing budget sehingga sasaran awal kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan terkait penjadwalan dan strategi pelaksanaan kegiatan secara detail
3. Mengoptimalkan LMS yang ringan dan mudah diakses dan Menyediakan materi dalam format *offline*(modul PDF, video rekaman).

Secara keseluruhan, BBPPMPV Bispar tidak hanya mengidentifikasi hambatan sebagai risiko pencapaian kinerja, tetapi juga secara proaktif menerapkan strategi mitigasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis sistem. Langkah antisipasi tersebut memastikan bahwa setiap hambatan tidak menjadi penghambat utama, melainkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pelatihan dan peningkatan mutu layanan pengembangan kompetensi vokasi.

STRATEGI IKK 1.1 untuk Tahun 2026

1. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi kurikulum yang selaras Industri untuk Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata secara luring dilaksanakan di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata selama 7 hari
2. Melaksanakan Upskilling Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Magang Industri selama 15 Hari

[IKK 1.2]	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan
--------------	---

Definisi Operasional

Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan pada Satuan Pendidikan Vokasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan merupakan indikator strategis yang mengukur efektivitas fungsi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam menjalankan mandat penjaminan mutu pendidikan vokasi. Pemetaan ini bertujuan untuk memotret kondisi riil satuan pendidikan (SMK) bidang Bisnis dan Pariwisata terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan keselarasan (*link and match*) dengan dunia kerja.

Untuk mencapai target ini, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menerapkan pendekatan sistematis yang meliputi:

- Identifikasi dan Klasifikasi: Menentukan basis data SMK sasaran di wilayah kerja yang memiliki konsentrasi keahlian Bisnis dan Pariwisata.
- Instrumen Pemetaan: Menggunakan instrumen yang selaras dengan Rapor Pendidikan dan standar delapan SNP (Standar Nasional Pendidikan) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri kreatif dan jasa.
- Verifikasi dan Validasi: Melakukan pendampingan baik secara daring maupun luring untuk memastikan data yang diunggah oleh satuan pendidikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Metode Perhitungan

$$I = A$$

Keterangan :

I = Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

A = Jumlah SMK dengan mutu yang terpetakan

Sehingga :

Jumlah satuan Pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan sama dengan jumlah SMK dengan mutu yang terpetakan yaitu sejumlah 787 lembaga.

Tabel 23. Capaian Target dan Daya Serap Anggaran IKK 1.2 Tahun 2025

Kinerja			Anggaran			% Daya Serap
Target	Capaian	% Capaian	Alokasi	Blokir	Realisasi	
733	787	107	Rp 4.903.076.000	Rp 2.272.518.000	Rp 2.630.558.000	100

Sumber : SPAN dan Spasikita

Berdasarkan informasi yang tersaji pada tabel, pencapaian IKK 1.2 dari sisi kinerja melampaui target (107%) dan daya serap anggaran mencapai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik, baik dari sisi output maupun pengelolaan anggaran. Meskipun terdapat blokir anggaran, hal tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja. Pagu anggaran yang dialokasikan di awal adalah Rp 4.903.076.000, namun karena adanya dana yang diblokir sebesar Rp 2.272.518.00, maka anggaran yang bisa digunakan adalah Rp 2.630.558.000.

Tabel 24. Realisasi IKK 1.2 Tahun Berjalan dibandingkan dengan Target Tahun Lalu dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian Akhir Renstra (2029)
Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	1412 lembaga	1412 lembaga	733 lembaga	787 lembaga	6321 lembaga	12%

Sumber : SPAN dan Spasikita

Berdasarkan tabel Realisasi IKK 1.2, capaian indikator *jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan* pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang **melampaui target tahunan**. Dari target 733 lembaga, realisasi mencapai 787 lembaga, atau sekitar **107% dari target 2025**. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan melebihi perencanaan tahun berjalan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan **target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 6.321 lembaga**, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai **12%**, sehingga masih diperlukan upaya percepatan dan konsistensi pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Adapun rincian program dan kegiatan terkait yang mendukung pencapaian target kinerja IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan antara lain

1. Penjaminan Mutu Asesmen Nasional : 10 satuan pendidikan
2. Tracer Study : 6 Dinas Pendidikan
3. Tes Kemampuan Akademik (TKA) : 12 lembaga
4. Perencanaan Berbasis Data : 733 satuan pendidikan
5. Happy tanpa bullying : 26 satuan pendidikan

Berdasarkan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan, BBPPMPV Bispar berhasil memetakan mutu pada **787 satuan pendidikan vokasi**, melampaui target awal sebesar **733 satuan pendidikan**, sehingga capaian kinerja mencapai **107%**. Faktor pendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain:

1. Integrasi Multi-Program dalam Satu Indikator Kinerja
Keberhasilan capaian IKK 1.2 ditopang oleh integrasi beberapa program lintas fungsi yang seluruhnya diarahkan pada tujuan pemetaan mutu satuan pendidikan. Program Asesmen Nasional, TKA, *Tracer Study*, PBD, dan *Happy Tanpa Bullying* secara simultan menghasilkan data mutu yang saling melengkapi, sehingga memperluas jangkauan satuan pendidikan yang terpetakan;
2. Fokus Strategis pada Program Perencanaan Berbasis Data (PBD)
Program PBD menjadi kontributor terbesar dengan capaian **733 satuan**

- pendidikan**, sehingga menjadi faktor dominan dalam keberhasilan kinerja. PBD memungkinkan sekolah melakukan refleksi berbasis rapor pendidikan dan menghasilkan data mutu yang valid, terstruktur, dan terintegrasi;
3. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
Dukungan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan sangat berperan dalam percepatan pengumpulan data dan pelaksanaan program.

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tentunya juga memiliki kendala dalam pencapaian indikator kinerja 1.2 antara lain:

1. Variasi Kesiapan Satuan Pendidikan
Tidak semua satuan pendidikan memiliki kesiapan yang sama dalam memahami instrumen pemetaan mutu, khususnya dalam pemanfaatan data rapor pendidikan;
2. Keterbatasan Literasi Data dan Digital
Sebagian sekolah masih mengalami kesulitan dalam mengakses, membaca, dan menginterpretasikan data mutu secara mandiri;
3. Beban Administratif Sekolah
Banyaknya program nasional yang harus diikuti sekolah menyebabkan keterbatasan waktu dalam pengisian dan validasi data.

Langkah antisipasi dan strategi yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata antara lain:

1. Pendampingan Teknis Terstruktur
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan pendampingan langsung melalui fasilitator dan widyaiswara dalam membaca rapor pendidikan, pengisian instrumen, dan analisis data mutu.
2. Pemanfaatan sistem daring dan digital (LMS)
Pendekatan sistem daring dan digital memungkinkan sekolah tetap mengikuti program meskipun terkendala jarak dan waktu.
3. Penguatan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Koordinasi intensif dilakukan untuk memperkuat komitmen sekolah serta sinkronisasi jadwal program
4. Penyederhanaan Panduan dan Instrumen
Disusun panduan teknis yang lebih sederhana, operasional, dan kontekstual agar mudah dipahami oleh sekolah

Keberhasilan capaian IKK 1.2 yang mencapai **107%** menunjukkan bahwa strategi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam mengintegrasikan berbagai program pemetaan mutu, khususnya melalui **Perencanaan Berbasis Data sebagai program unggulan**, terbukti efektif dan berdampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja.

Strategi IKK 1.2 untuk tahun 2026

Strategi utama Bispar tidak hanya berorientasi pada kuantitas satuan pendidikan yang terpetakan, tetapi juga pada **kualitas proses pemetaan**, melalui pendampingan, pemanfaatan sistem digital, dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan.

[IKK 1.3]	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja
------------------	---

Definisi Operasional

Pengembangan model pendidikan vokasi adalah proses penelitian terapan yang merancang tipe, desain, bentuk deskripsi, sistem kegiatan, yang diproses dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan hasilnya dapat mewakili kondisi nyata yang diharapkan oleh kelompok sasaran dan mampu memecahkan masalah bidang pendidikan vokasi. Untuk memperoleh hasil seperti itu, model program atau pembelajaran divalidasi oleh ahli dan praktisi dan diujicobakan sehingga model yang dihasilkan efektif, efisien, praktis dan menarik dalam memecahkan masalah atau dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Model yang dikembangkan dapat berbentuk model adaptasi dan model baru. Model baru merupakan pengembangan model yang telah ada.

Metode Perhitungan :

I = Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra kerja

Jumlah model pembelajaran vokasi yang berhasil dikembangkan dengan mitra kerja di Tahun 2025 adalah sebanyak dua (2) , hal tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Adapun satuan Pendidikan yang terlibat adalah : SMK Metland dan SMK Mitra Industri MM2100.

Inovasi Pembelajaran tahun 2025 menghasilkan 2 model pembelajaran, yaitu *Project Based Learning 5.0* dan *Blended Learning* dengan *Microlearning* dan *Gamifikasi*. Proses inovasi dimulai dengan analisa kebutuhan kemudian baru dikembangkan model pembelajaran inovatif tersebut sesuai kebutuhan dalam pembelajaran di sekolah. Inovasi menghasilkan buku model inovasi Pjbl 5.0 dan

Blended Learning dengan Microlearning dan Gamifikasi. Selanjutnya, model pembelajaran yang dikembangkan akan diujicobakan ke SMK sasaran. Setelah itu, didesiminasikan ke beberapa SMK di Indonesia untuk diharapkan dapat dikenalkan dan diimplementasikan.

Tabel 25. Capaian Target dan Daya Serap Anggaran IKK 1.3 Tahun 2025

Kinerja			Anggaran			% Daya Serap
Target	Capaian	% Capaian	Alokasi	Blokir	Realisasi	
2	2	100	Rp 252.773.000	Rp 79.318.000	Rp 173.453.000	100

Sumber : SPAN dan Spasikita

Berdasarkan Tabel Capaian Target dan Daya Serap Anggaran IKK 1.3 Tahun 2025, kinerja kegiatan menunjukkan hasil yang **optimal**. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 2 berhasil direalisasikan seluruhnya dengan capaian 2 atau **100% dari target**. Dari sisi anggaran, total alokasi sebesar Rp252.773.000 dengan dana terblokir Rp79.318.000, sehingga anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp173.453.000. Seluruh anggaran yang tersedia tersebut telah terserap **100%**, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang efektif serta efisien, sekaligus mendukung pencapaian target kinerja secara penuh.

Tabel 26. Realisasi IKK 1.3 Tahun Berjalan dibandingkan dengan Target Tahun Lalu dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Capaian Akhir Renstra (2029)
Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra kerja	4 rekomendasi kebijakan	4 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	2 rekomendasi kebijakan	22	9%

Sumber : SPAN dan Spasikita

Berdasarkan Tabel Realisasi IKK 1.3 Tahun Berjalan, indikator *jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra kerja* pada tahun 2025 menunjukkan **capaian sesuai dengan target**. Dari target 2 rekomendasi kebijakan, seluruhnya berhasil direalisasikan sebanyak 2 rekomendasi atau **100% dari target tahunan**. Namun demikian, jika dibandingkan dengan **target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 22 rekomendasi**, capaian hingga tahun 2025 baru mencapai **9%**, sehingga masih diperlukan penguatan kolaborasi dengan mitra kerja serta kesinambungan pengembangan model pembelajaran vokasi pada tahun-tahun selanjutnya agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal.

Keterlibatan mitra industri dari sekolah sasaran pendampingan memastikan bahwa setiap proyek pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada penguatan kompetensi kerja, soft skills, dan budaya industri. Dengan demikian, model ini berfungsi sebagai *bridging model* yang menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan nyata dunia kerja.

Kendala dalam ketercapaian indikator antara lain:

1. Keterbatasan waktu kolaborasi dengan mitra industri

Mitra industri memiliki keterbatasan waktu dalam terlibat langsung pada proses desain pembelajaran karena fokus pada aktivitas operasional bisnis;

2. Variasi literasi Digital pendidik

Tidak semua guru memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Blended Learning berbasis microlearning dengan gamifikasi secara optimal;

3. Tantangan dalam Standarisasi Model

Perbedaan karakteristik program keahlian menyebabkan kesulitan dalam menyusun satu model yang dapat langsung diterapkan secara seragam di semua konteks.

Langkah antisipasi dan strategi dalam menghadapi kendala adalah:

1. Optimalisasi Peran Industri sebagai Validator

Peran mitra industri difokuskan pada validasi kompetensi, skenario proyek, dan standar output, sehingga keterlibatan tetap efektif meskipun terbatas waktu;

2. Penguatan Kapasitas Guru melalui Pendampingan

BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan pendampingan intensif terkait microlearning dengan gamifikasi, dan PjBL 5.0, dalam pengembangan konten digital;

3. Penyediaan Template dan Panduan Model

Disusun panduan implementasi, template modul, serta contoh *best practice* agar guru dapat lebih mudah mereplikasi dan mengadaptasi model.

Strategi IKK 1.3 untuk Tahun 2026

Strategi utama BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam mencapai indikator *Jumlah Model Pembelajaran Vokasi yang Dikembangkan dengan Mitra Dunia Kerja* Adalah :

1. Menempatkan **Inobel Blended Learning berbasis Microlearning dengan Gamifikasi dengan PjBL 5.0** sebagai model inovasi yang:
2. TEFA untuk pengembangan Tefa Di SMK;
3. Pengembangan Produk Bebrbasis Industri;

Dengan pendekatan tersebut, capaian kinerja tidak hanya menghasilkan satu produk model pembelajaran, tetapi membangun **ekosistem inovasi pembelajaran vokasi** yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai pusat unggulan pengembangan model pembelajaran vokasi berbasis industri di tingkat nasional.

SK 2. Meningkatkan tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

Sasaran Kegiatan 2 berupa meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dari 2 Indikator tersebut, seluruhnya berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut akan dijelaskan pada masing-masing indikator.

Tabel 27. Capaian Sasaran SK 2 Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (predikat)	A	A	100%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (nilai)	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

[IKK 2.1]	Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
------------------	--

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada

Aplikasi Spasikita Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kementerian Keuangan. Capaian nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan penilaian berdasarkan :

1. Nilai EKA (50%) yang diambil dari evaluasi kinerja anggaran pada aplikasi SPASIKITA pada menu SIMPROKA dan,
2. Nilai IKPA (50%) yakni indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Definisi Operasional

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Metode Perhitungan :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Berdasarkan data kinerja anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, nilai **IKPA** tercatat sebesar **98,46** dan nilai **EKA** mencapai **100**. Mengacu pada rumus **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = [50% × Nilai EKA] + [50% × Nilai IKPA]**, maka diperoleh nilai **NKA sebesar 99,23**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran berada pada kategori **sangat baik**.

Analisis Keberhasilan, Hambatan, dan Strategi Pencapaian NKA 2025



Gambar 20. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2021-2025

Tahun 2025, pencapaian NKA BBPPMPV Bispar menempai **urutan tertinggi** dengan nilai 99.23 dari total 7 (tujuh) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Sater

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	138.35.85544	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA	100,00	98,46	99,23

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 21. Penilaian NKA Tahun 2025
Sumber : Monev.kemenkeu

Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran, meliputi Renstra, Renja, dan RKA-K/L. Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja dengan penetapan output dan target yang terukur. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mendorong tercapainya nilai EKA dan IKPA yang optimal.

Keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran ditunjukkan oleh nilai IKPA sebesar 98,46 dan nilai EKA sebesar 100, sehingga menghasilkan nilai NKA sebesar 99,23. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tersebut antara lain kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian tagihan, serta efektivitas pengendalian internal. Selain itu, koordinasi antarunit kerja berjalan dengan baik sehingga mendukung ketercapaian target kinerja anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, tidak terdapat hambatan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja anggaran. Namun demikian, masih dijumpai tantangan berupa potensi deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran serta penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan. Hambatan tersebut bersifat administratif dan dapat dikendalikan sehingga tidak mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Sebagai langkah antisipasi, satuan kerja melakukan penguatan perencanaan penarikan dana, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara periodik, serta percepatan penyelesaian administrasi keuangan. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi antara penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran.

Strategi pencapaian target kinerja anggaran tahun 2025 dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan juga menjadi bagian dari strategi dalam menjaga capaian kinerja anggaran pada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 99,23, capaian kinerja anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025 dinyatakan **berhasil** dan berada pada kategori **sangat baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Strategi Pencapaian NKA Tahun 2026

Dalam aspek **perencanaan kinerja**, strategi tahun 2026 difokuskan pada penguatan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya keselarasan antara Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Langkah ini sejalan dengan prinsip SAKIP dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan berorientasi hasil.

Pada tahap **pelaksanaan anggaran**, strategi diarahkan pada peningkatan konsistensi antara rencana dan realisasi kinerja. Pemerataan penyerapan anggaran sepanjang tahun serta percepatan proses pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam kerangka SAKIP.

Selanjutnya, penguatan **monitoring dan evaluasi kinerja** dilaksanakan secara periodik dan berjenjang. Monitoring dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan dalam mencapai outcome yang diharapkan. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya, sehingga tercipta mekanisme *continuous improvement*.

Peningkatan kompetensi **sumber daya manusia pengelola kinerja dan anggaran** menjadi salah satu strategi utama tahun 2026. Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi SAKIP, pengelolaan keuangan negara, serta pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut, diharapkan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2026 tidak hanya dapat dipertahankan pada kategori **sangat baik**, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai SAKIP instansi secara keseluruhan, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Tahun 2025, nilai IKPA BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata ada di angka 98.46. Berikut adalah rangkuman nilai IKPA dari tahun 2021 - 2025.



Gambar 22. Nilai IKPA Tahun 2021-2025

Berdasarkan gambar Nilai IKPA Tahun 2021–2025, kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tren perbaikan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023. Nilai IKPA meningkat signifikan pada tahun 2024 dan kembali membaik pada tahun 2025 yang mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan penguatan akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Tabel 28. Penilaian IKPA Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	088	138	693454	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA	Nilai	100.00	89.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.86		100.00				100.00				

Sumber : SPAN 2025

Berdasarkan hasil pengukuran **Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** sampai dengan bulan Desember, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memperoleh **nilai akhir sebesar 98,46**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran berada pada **kategori sangat baik**, serta mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan kerja.

Pada aspek **Kualitas Perencanaan Anggaran**, indikator **Revisi DIPA** memperoleh nilai **100**, yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara matang dan konsisten sehingga tidak memerlukan perubahan signifikan selama tahun anggaran berjalan. Indikator **Deviasi Halaman III DIPA** memperoleh nilai **89,71**, yang mengindikasikan masih terdapat deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi, namun deviasi tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak berdampak terhadap ketercapaian output kegiatan. Nilai aspek perencanaan anggaran secara keseluruhan tercatat sebesar **94,86**, yang menunjukkan kualitas perencanaan anggaran sangat baik.

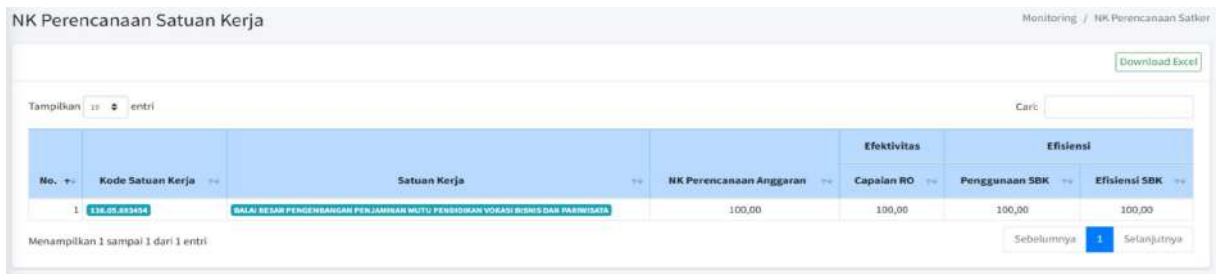
Pada aspek **Kualitas Pelaksanaan Anggaran**, seluruh indikator memperoleh nilai **100**, meliputi **Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, serta Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara tepat waktu, sesuai ketentuan perbendaharaan, serta didukung oleh pengelolaan administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.

Selanjutnya, pada aspek **Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**, indikator **Capaian Output** memperoleh nilai **100**. Hal ini menegaskan bahwa realisasi anggaran telah selaras dengan pencapaian output kegiatan yang direncanakan, sehingga belanja yang dilakukan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan target.

Secara keseluruhan, capaian IKPA sebesar **98,46** tanpa adanya dispensasi SPM (pengurangan) menunjukkan bahwa BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)** tahun 2025 dan mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memperoleh nilai EKA sempurna, yaitu 100.



The screenshot shows a web interface for monitoring the NK Perencanaan Satuan Kerja. It includes a search bar, a table with columns for No., Kode Satuan Kerja, Satuan Kerja, NK Perencanaan Anggaran, Efektivitas (Capaian RO), and Efisiensi (Penggunaan SBK and Efisiensi SBK). The data row shows a value of 100.00 for all metrics.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	138.05.203404	BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 23. Penilaian EKA Tahun 2025
Sumber : Monev.kemenkeu

Dari aspek **perencanaan anggaran, efektivitas**, capaian **Rincian Output (RO)** nilai yang dicapai adalah **100**. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara tepat sasaran dan mampu menghasilkan kinerja yang optimal.

Sementara itu, dari aspek **efisiensi**, nilai **Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) sebesar 100** menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. Penggunaan anggaran dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan standar biaya yang berlaku, tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, hasil EKA tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata telah memenuhi prinsip **value for money**, yaitu efektif, efisien, dan akuntabel. Capaian ini menjadi indikator bahwa anggaran telah berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

[IKK 2.2]	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
------------------	---

Definisi Operasional

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinilai melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian yaitu:

Tabel 29. Nilai SAKIP 4 Komponen

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%
Total Nilai	100%

Metode Perhitungan :

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi =

(Nilai Perencanaan Kinerja) + (Nilai Pengukuran Kinerja) + (Nilai Pelaporan Kinerja)
+ (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)

Analisis Keberhasilan, Hambatan, dan Strategi Pencapaian NKA 2025

 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025			
No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	27
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21.25
Predikat		A	88

Gambar 24. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPMPV Bisnis dan pariwisata Tahun 2025

Pada tahun 2025, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata menunjukkan performa kinerja yang sangat baik secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari perolehan Nilai Akhir sebesar 88 dengan predikat "A". Pencapaian ini merupakan hasil dari integrasi yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan internal.

Keberhasilan meraih predikat A dengan nilai 88 didorong oleh sinkronisasi antara program kerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Program-program unggulan seperti pelatihan guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata, serta program magang industri bersertifikasi, telah dirancang secara linier dengan komponen Perencanaan Kinerja.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki alat ukur yang jelas, sehingga kontribusi setiap satuan kerja menjadi sangat terukur dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan vokasi.

Faktor utama keberhasilan pencapaian adalah:

- **Komitmen Pimpinan dan Staf:** Tingginya nilai pada Evaluasi Internal menunjukkan adanya pengawasan melekat yang konsisten.
- **Ketepatan Perencanaan:** Target yang ditetapkan bersifat *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) sehingga memudahkan eksekusi di lapangan.
- **Sistem Monitoring yang Solid:** Nilai tinggi pada Pengukuran Kinerja membuktikan bahwa data capaian dikumpulkan dan divalidasi dengan baik, sehingga meminimalisir gap antara rencana dan realisasi.

Adapun hambatan atau permasalahan yang dihadapi berupa kecepatan sinkronisasi data antar unit kerja yang terkadang menghambat ketepatan waktu penyajian laporan komprehensif. Untuk mengatasi kendala pelaporan dan dinamika industri, langkah yang telah diambil adalah dengan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kinerja untuk pengumpulan data secara *real-time* guna memastikan efisiensi pada aspek pelaporan.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 dinyatakan berhasil. Capaian predikat A menunjukkan bahwa tidak ada kegagalan signifikan dalam indikator kinerja utama.

Keberhasilan ini menandakan bahwa organisasi telah menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran melalui hasil kerja yang nyata di sektor vokasi bisnis dan pariwisata.

Strategi Pencapaian NKA Tahun 2026

Strategi pencapaian nilai kinerja tahun 2026 difokuskan pada penguatan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Pada aspek pengukuran kinerja, strategi diarahkan pada penguatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berbasis data yang valid. Setiap indikator kinerja didukung oleh sumber data yang jelas dan terdokumentasi, sehingga hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

Selanjutnya, peningkatan kualitas pelaporan kinerja dilakukan dengan menyusun laporan yang lebih analitis dan informatif, yang menggambarkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai. Laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian, tetapi juga memuat analisis atas kendala dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan.

Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, strategi difokuskan pada penguatan peran evaluasi internal sebagai instrumen pengendalian dan penjaminan mutu kinerja. Hasil evaluasi internal dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program.

Melalui implementasi strategi tersebut, diharapkan pada tahun 2026 kualitas akuntabilitas kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Realisasi Program/Agenda Prioritas

Tabel 30. Realisasi program prioritas/Agenda Prioritas

No	Nama	Realisasi
1	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	811 peserta
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang Mengikuti <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Berstandar Industri	1874 peserta
	a. Pelatihan Upskilling dan Reskilling bagi Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata	1180
	b. Pelatihan Manajerial Kepala Sekolah	68
	c. Pelatihan Pengawas SMK	54
	d. Pelatihan PTK PNBP	467
	e. Pelatihan Guru Mata Pelajaran Umum	66
3	Instruktur Kursus yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Industri Bidang keahlian Teknologi Terapan	39
4	Penjaminan Mutu Asesmen nasional	10 Satuan Pendidikan
6	Tracer Study	6 lembaga
7	Tes kemampuan Akademik (TKA)	12 lembaga
8	Perencanaan Berbasis Data	733 satuan Pendidikan
9	Happy tanpa bullying	26 satuan pendidikan

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2025 pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata menunjukkan kinerja yang efektif dan akuntabel. Realisasi anggaran mencapai tingkat serapan yang optimal dan sejalan dengan capaian output yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui perencanaan yang terarah, pengendalian internal yang konsisten, serta penyesuaian kegiatan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program.

Pagu anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp. 90.604.114.000 . Dari pagu anggaran tersebut terdapat blokir Rp 19.005.221.000. Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar 71.597.687.780 dengan persentase daya serap sebesar **100%** (blokir tidak diperhitungkan).

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian **dua (2)** sasaran dengan lima **(5)** indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025:

Tabel 31. Realisasi anggaran per program Tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Guru Kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Rp 2.256.961.000	Rp 2.256.961.000	100
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	18.072.194.000	Rp 18.071.854.000	100
3	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Rp 398.570.000	Rp 398.570.000	100

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Rp 2.630.558.000	Rp 2.630.558.000	100
5	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rp 173.455.000	Rp 173.453.000	100
6	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Rp 236.814.000	Rp 236.814.000	100

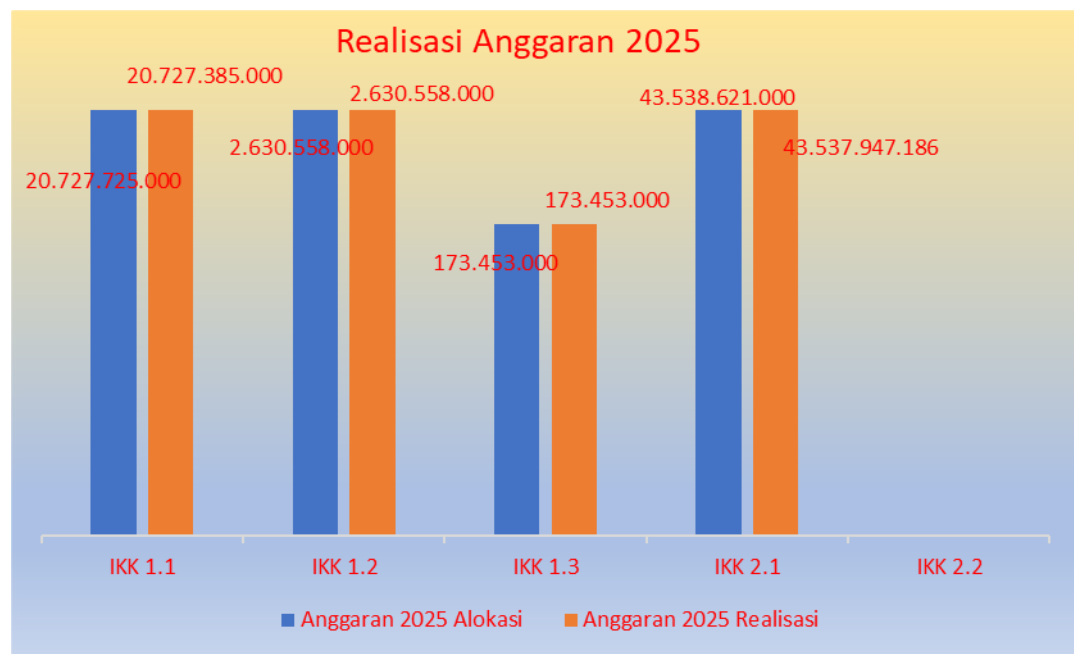
Sumber : SAKTI

Tabel 32. Realisasi Anggaran Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2025		
		ANGGARAN	REALISASI	%
[SK. 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidikan dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja (persen)	Rp 20.727.725.000	Rp 20.727.385.000	100
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan (lembaga)	Rp 2.630.558.000	Rp 2.630.558.000	100
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja (rekomendasi kebijakan)	Rp 173.455.000	Rp 173.453.000	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2025		
		ANGGARAN	REALISASI	%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (predikat)	Rp 43.538.621.000	Rp 43.537.947.186	100
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata (nilai)			

Sumber : SAKTI



Gambar 25. Realisasi Anggaran 2025

Capaian kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran yang sangat optimal, di mana seluruh

program unggulan berhasil mencapai realisasi sebesar 100%. Keberhasilan ini didominasi oleh program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi melalui kegiatan *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar industri dengan serapan anggaran terbesar mencapai Rp 18.071.854.000. Hal ini membuktikan adanya perencanaan yang matang dan eksekusi program yang tepat sasaran, sehingga seluruh sumber daya finansial telah berhasil dikonversi menjadi penguat kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.



Gambar 26. Capaian Anggaran Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata menunjukkan performa pengelolaan keuangan yang sangat efektif dan akuntabel. Hal ini tercermin dari total realisasi anggaran yang mencapai **Rp 71.597.687.780** atau sebesar **100%** dari pagu efektif setelah dikurangi blokir. Pengelolaan anggaran tahun ini ditandai dengan beberapa penyesuaian strategis, antara lain:

- **Pagu Awal:** Ditetapkan sebesar **Rp 87.571.238.000**.
- **Revisi Anggaran:** Terdapat penambahan melalui revisi PNPB sebesar **Rp 3.032.876.000**, sehingga total Pagu Akhir tercatat **Rp 90.604.114.000**.
- **Efisiensi dan Blokir:** Terdapat dana blokir sebesar **Rp 19.005.221.000**, namun BBPPMPV tetap mampu mengoptimalkan sisa anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja secara maksimal.

Keberhasilan serapan anggaran 100% ini didorong oleh pelaksanaan tiga program utama yang berjalan sesuai target:

- **Peningkatan Kompetensi SDM Vokasi:** Program *Upskilling* dan *Reskilling* berstandar industri bagi pendidik vokasi menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai **Rp 18.071.854.000**.
- **Penyelarasan Kurikulum:** Kegiatan pelatihan kurikulum bagi Guru Kejuruan yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja terealisasi penuh sebesar **Rp 2.256.961.000**.
- **Pelatihan Bidang Teknologi Terapan:** Program pelatihan bagi instruktur kursus berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp 398.570.000** secara tepat sasaran.

Secara keseluruhan, realisasi 100% pada program-program teknis tersebut membuktikan bahwa perencanaan kinerja telah selaras dengan eksekusi keuangan. Pencapaian ini menegaskan komitmen institusi dalam mendukung transformasi pendidikan vokasi melalui pemanfaatan anggaran yang transparan dan berorientasi pada hasil, guna menghasilkan tenaga pendidik vokasi yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja pada satuan kerja. Pada tahun **2025**, **BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata** berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp 727.510.000**. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari **RO.SCI.002**. Pelatihan Guru Kejuruan dan 574.EBA.956. Layanan BMN sebagai SBKU. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti :

- a. Teachers Development Program (TDP) bagi Guru SMK Bidang Keahlian Tata Kecantikan Rambut Tahun 2025, Dengan Jumlah Peserta 20 Guru SMK Bidang Tata Kecantikan dari seluruh Indonesia.

- b. Peningkatan Kompetensi Guru SMK Bidang Tata Boga (TOT of French cooking for Vocarional culinary Teaching) Bekerja sama dengan Pemerintah Prancis dalam pelaksanaan Kegiatan, dengan Jumlah Peserta 48 Peserta Guru Tata Boga dari seluruh Indonesia.

Narasi Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 menunjukkan bahwa **BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata** mampu mencapai target kinerja secara efektif dengan tingkat efisiensi anggaran yang baik. Realisasi anggaran Rp. **71.597.687.7** berada di bawah pagu yang telah ditetapkan Rp. **90.604.114.000 dengan anggaran Blokir A sebesar Rp 19.005.221.000.** tanpa mengurangi kualitas keluaran (output) maupun hasil (outcome) yang direncanakan. Efisiensi tersebut terutama diperoleh melalui optimalisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, pengurangan biaya non-prioritas, serta konsolidasi kegiatan yang memiliki kesamaan sasaran.

Meskipun terjadi penghematan anggaran, capaian kinerja tetap berada pada atau di atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa **BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata** berhasil menerapkan prinsip value for money, yaitu mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih efisien. Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 **BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata** menggambarkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, serta mendukung upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Pada tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melakukan efisiensi sebesar Rp 727.510.000 atau 1% dari total alokasi anggaran Rp.

90.604.114.000,00. Berikut rincian efisiensi yang diperoleh:

1. Optimalisasi perjalanan dinas dan rapat di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday);
2. Penghematan belanja jasa profesi, barang, dan modal; dan
3. Penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU).

Adapun efisiensi yang dilakukan oleh BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dimanfaatkan kembali untuk pelaksanaan program-program prioritas di unit lainnya, seperti:

1. Pemenuhan pelaksanaan program Upskilling Teachers Development Program (TDP) bagi Guru SMK Bidang Keahlian Tata Kecantikan Rambut;
2. Pemenuhan pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Guru SMK Bidang Tata Boga (TOT of French cooking for Vocarional culinary Teaching).

C.Kinerja Lain-lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Komitmen dan Tata Kelola Reformasi Birokrasi, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Manajemen Perubahan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Membentuk dan mengaktifkan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja.
 - 2) Menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi yang selaras dengan kebijakan RB kementerian.
 - 3) Melakukan internalisasi nilai-nilai RB kepada seluruh pegawai.
- b. Penataan Organisasi dan Tata Laksana, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Penguatan Tata Laksana. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 2) Melakukan evaluasi efektivitas struktur organisasi dan pembagian tugas.
 - 3) Penyederhanaan birokrasi dan alur layanan agar lebih efisien.

- c. Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerapan manajemen kinerja ASN berbasis target dan capaian.
 - 2) Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan kapasitas.
 - 3) Penegakan disiplin dan pembinaan pegawai secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dokumen Perencanaan Kinerja (Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi).
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
 - 3) Menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja unit kerja.
- e. Penguatan Pengawasan, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Penguatan Pengawasan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi.
 - 3) Pelaksanaan upaya pencegahan praktik korupsi dan gratifikasi.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, langkah ini dilakukan oleh tim di Bidang Peningkatan Layanan Publik. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan.
 - 2) Mengembangkan layanan berbasis digital (pendaftaran, informasi, dan administrasi layanan).
 - 3) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

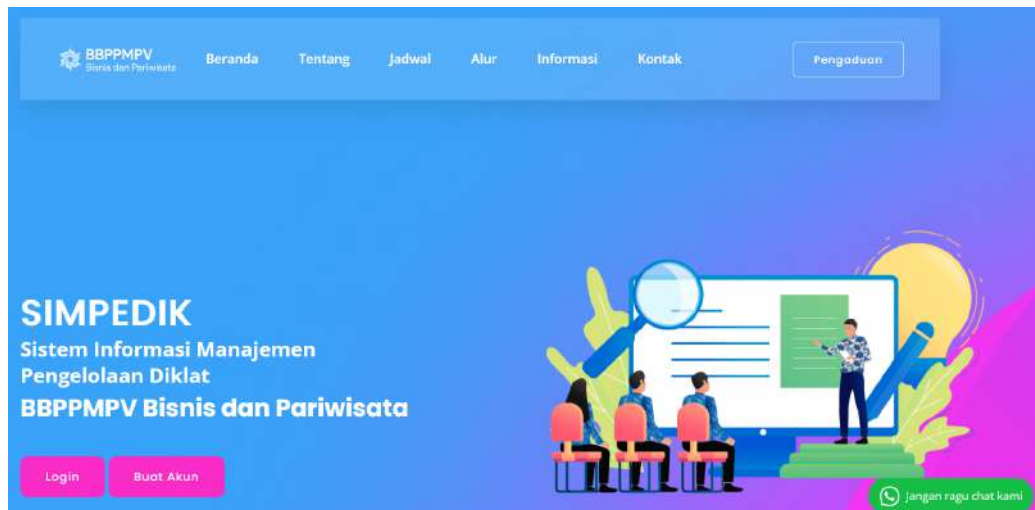
2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2025 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) Bagi SMK wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan, Dimana setiap SMK mengirimkan 4 perwakilan yaitu Kepala Sekolah dan 3 Guru Bidang Ilmu Kejuruan, dalam hal ini BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai tempat penyelenggara pelatihan dengan Fasilitas yang sudah melalui Pelatihan TOT fasilitator sebelumnya.

3. Inovasi

Pada tahun 2025 **BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata** melakukan inovasi :

a. Pembaruan fitur pada aplikasi SIMPEDIK

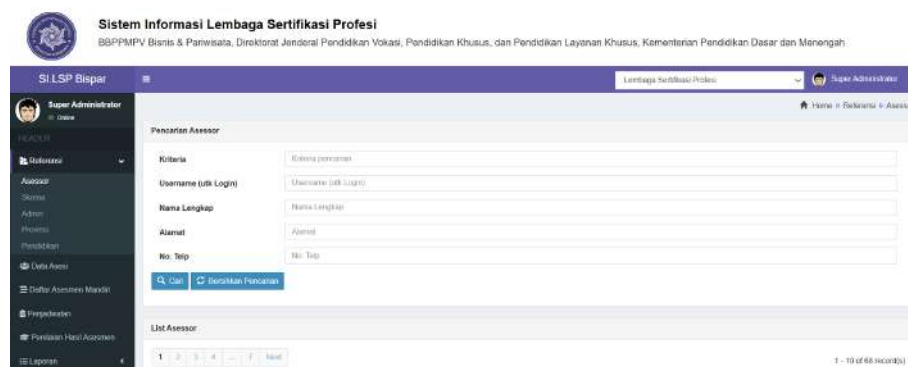


Gambar 27. Fitur SIMPEDIK

SIMPEDIK adalah Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Diklat BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata yang mengakomodir semua kebutuhan diklat mulai dari registrasi hingga penerbitan sertifikat. Pada tahun 2025 dilakukan pengembangan fitur yaitu:

- 1) Sinkronisasi data guru dengan DAPODIK, informasi guru peserta diklat lebih *up to date*.
- 2) *Responsive mobile view*, tampilan SIMPEDIK yang responsif terhadap alat yang digunakan.

b. Pengembangan aplikasi SI.LSP



Gambar 28. Aplikasi SI.LSP

Aplikasi SI.LSP mengakomodir aktivitas yang dilakukan oleh LSP BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai berikut:

- 1) Manajemen Data Asesi, Asesor, Skema
- 2) Asesmen Mandiri Peserta
- 3) Verifikasi Asesmen Peserta oleh Asesor
- 4) Penjadwalan Uji Kompetensi
- 5) Laporan Asesi, Asesmen Mandiri, Uji Kompetensi

Dengan menggunakan aplikasi ini, proses kegiatan LSP yang semula masih menggunakan kertas, sudah dialihkan menjadi *less paper* (digital) sehingga mendukung birokrasi pemerintah yang menerapkan *e-government*.



Gambar 30. Foto penerimaan penghargaan KIP

- b) **Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM)** dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan institusi dalam membangun sistem birokrasi yang bersih dari praktik korupsi serta berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan.
- c) **Pelayanan Prima (Kategori A)** sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik dalam kegiatan **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025**. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi standar pelayanan publik yang unggul, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



Gambar 31. Foto Penerimaan Penghargaan ZI WBBM dan Pelayanan Prima

5. Program *Crosscutting/Collaborative*

Pada tahun 2025 BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melakukan program *crosscutting/collaborative* pada beberapa program seperti yang tertuang pada tabel diatas. Pelaksanaan Pelaksanaan program *crosscutting* BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta mitra internasional dan dunia industri, antara lain:

a) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan unit terkait sebagai pembina kebijakan nasional dan penjamin arah strategis pengembangan kompetensi SDM pendidikan vokasi.

b) BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berperan sebagai koordinator teknis, penyedia layanan pelatihan, serta penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI).

c) Pemerintah Daerah

- 1) BKPSDM Kota Tangerang;
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah daerah berperan sebagai mitra utama dalam penyediaan anggaran (melalui DIPA daerah), penetapan sasaran peserta, serta integrasi hasil pelatihan ke dalam kebijakan pengembangan SDM daerah.

d) Satuan Pendidikan (Pusat Belajar)

Berperan sebagai penyedia peserta, mentor lapangan, serta lokasi implementasi hasil pelatihan dalam praktik pembelajaran di sekolah khususnya pada pelatihan *Upskilling* dan *Reskilling* bagi Guru SMK

e) Mitra Industri

Termasuk industri mitra Pusat Belajar serta mitra internasional seperti Institut Français d'Indonésie (IFI) dan Escoffier dalam program ToT Prancis, yang berperan sebagai penyedia standar industri, fasilitator praktisi, serta tempat magang.

Dampak strategis dari program crosscutting antara lain

- a. Dampak terhadap kualitas SDM Pendidik
 - 1) Meningkatnya kompetensi profesional guru dalam bidang bisnis, pariwisata, boga, kewirausahaan, pembelajaran mendalam, serta koding dan AI.
 - 2) Guru memiliki pengalaman langsung praktik industri, bukan hanya teori.
- b. Dampak terhadap satuan Pendidikan
 - 1) Terjadinya penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri (*link and match*).
 - 2) Terciptanya kolaborasi berkelanjutan antara satuan Pendidikan dengan mitra industri
- c. Dampak terhadap pemerintah daerah
 - 1) Terbangunnya system pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan
 - 2) Efisiensi anggaran melalui sinergi pusat dan daerah
 - 3) Peningkatan Indeks Kinerja SDM Pendidikan daerah
- d. Dampak terhadap Dunia Usaha Dunia Industri
 - 1) Industri terlibat langsung dalam mencetak kompetensi SDM masa depan
 - 2) Terbangunnya ekosistem kemitraan Pendidikan-industri

Secara garis besar, program crosscutting BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berdampak pada penguatan kebijakan link and match Pendidikan vokasi dengan DUDI, terwujudnya kolaborasi lintas sektor (pemerintah pusat, daerah, dan industri), serta meningkatnya daya saing Pendidikan vokasi Indonesia menuju lebih baik.

Tabel 33. Matriks Kegiatan Crosscutting

Matrik Kegiatan Crosscutting BBPMPV BISNIS DAN PARIWISATA - TAHUN 2025										
NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LANDASAN CROSSCUTTING	UNIT PUSAT TERKAIT	UPT TERKAIT	CROSSCUTTING BBPMPV BISNIS DAN PARIWISATA	JUMLAH	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	Pelatihan Bidang Pendidikan	1. Pelatihan Guru kejuruan	DIPA BBPMPV Bisnis dan Pariwisata 2025	Ditjen Vokasi PKPLK	BBPMPV Bispar	BBPMPV Bisnis dan Pariwisata sebagai Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan Pelatihan <i>Upkilling</i> dan <i>Reskillin g</i> Berstandar Industri bagi Guru Kejuruan Bisnis dan Pariwisata, berkolaborasi dengan SMK yang menjadi Pusat Belajar (PB) dan Industri mitra PB yang akan menjadi tempat Magang di industri bagi peserta pelatihan. PB menugasi guru bidang keahlian yang akan menjadi mentor berkolaborasi dengan fasilitator BBPMPV Bispar sebagai pengajar pelatihan. Dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pusat Belajar (PB), Industri Mitra dan diketahui oleh BBPMPV Bisnis dan Pariwisata	1175	Orang	Maret s.d September	Penanggungjawab Tim Kerja Penjaminan Mutu
2	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Angkatan 1	1. Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kota Tangerang dengan BBPMPV Bisnis dan Pariwisata 2. DIPA BKPSDM Kota Tangerang tahun 2025	BKPSDM Kota Tangerang	BBPMPV Bispar dan BKPSDM Kota Tangerang	Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi berdasar kepada anggaran DIPA BKPSDM Kota Tangerang selaku pelaksana Kegiatan dan BBPMPV Bisnis dan Pariwisata selaku penyedia Rancangan program, Fasilitator, dan Sarana Prasarana pelaksanaan kegiatan	300	Orang	7 hari	Kepala Bagian Tata Usaha BBPMPV Bisnis dan Pariwisata
		Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Angkatan 2								
		Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Angkatan 3								
		Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Angkatan 4								
3	Peningkatan Kompetensi Pendidik di Kabupaten Tangerang	Peningkatan Kompetensi bagi Guru SMA Kabupaten Tangerang	1. Surat Permohonan Kerjasama Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Nomor: 400.3.8/0500-KCD.KabTgr/2025 2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan BBPMPV Bisnis dan Pariwisata 3. DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2025	Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	BBPMPV Bisnis dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang	a. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi dengan berdasar kepada DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. b. BBPMPV Bisnis dan Pariwisata menyediakan Rancangan program, Fasilitator, dan Sarana Prasarana selama pelaksanaan kegiatan	38	Orang	6 Hari	Penanggungjawab Tim Kerja Pengembangan Mutu dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi
		Peningkatan Kompetensi bagi Guru SMK Kabupaten Tangerang								
4	Pengembangan Kompetensi Pendidik di Bidang Kewirausahaan Provinsi Kalimantan Timur	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik dalam Bidang Kewirausahaan dan Bisnis Jenjang Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Timur	1. Surat Permohonan Kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.7/21355/Disdikbud 2. Surat Jawaban Permohonan Fasilitas Kegiatan BBPMPV Bisnis dan Pariwisata Nomor: 1470/D7.3/AK.00.07/2005	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	BBPMPV Bisnis dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur	a. Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi dengan berdasar kepada DIPA Dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Timur. b. BBPMPV Bisnis dan Pariwisata menyediakan Rancangan program, Fasilitator selama pelaksanaan kegiatan	74	Orang	4 Hari	Penanggungjawab Tim Kerja Pengembangan Mutu dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi
5	Training of Trainer bagi Guru SMK Boga kerjasama BBPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan Kedutaan Besar Prancis	French Indonesian Training of Trainers (ToT) on French Cooking for Vocational Education Training	Technical Arrangement between The Directorate General of Vocational Education of The Ministry of Education, culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia and The Institut Francais D'Indonesie on The Development of Vocational Education in Hospitality and Culinary	Sesditjen Kemendikdasmen	BBPMPV Bisnis dan Pariwisata, Kedutaan Besar Prancis dan escoffier	a. melaksanakan kegiatan ToT bagi Guru Boga SMK khususnya Bidang cookery dan Pastry makanan Prancis dengan menggunakan sharing dana BBPMPV Bispar dengan kedutaan besar Prancis b. fasilitator disediakan dari pihak escoffier, untuk panitia dan tempat pelaksanaan dari BBPMPV Bisnis dan Pariwisata	44	orang	21 hari	Penanggungjawab Tim Kerja Pengembangan Mutu dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi
6	Peningkatan Kompetensi Pendidik di Wilayah Provinsi Banten	1. Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Guru SMK di lingkungan wilayah provinsi Banten 2. Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial bagi Guru SMK/SMA di lingkungan wilayah provinsi Banten	1. Surat permohonan fasilitasi kegiatan pelatihan pembelajaran Mendalam Nomor: B-300.2.5.1/17458/Dindikbud/2025 2. Surat Permohonan fasilitasi kegiatan pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial bagi Guru SMK/SMA di lingkungan wilayah Banten Nomor : B-300.2.5.1/17457/Dindikbud/2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	BBPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	Melaksanakan pelatihan Peningkatan Kompetensi berdasar kepada anggaran DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku pelaksana Kegiatan dan BBPMPV Bisnis dan Pariwisata selaku penyedia Rancangan program, Fasilitator, dan Sarana Prasarana pelaksanaan	281	orang	7 hari	Penanggungjawab Tim Kerja Pengembangan Mutu dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja yang disampaikan dalam laporan ini menunjukkan tingkat keberhasilan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan.

Melalui evaluasi ini, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berkomitmen untuk memperkuat langkah peningkatan kinerja di tahun berikutnya, termasuk penguatan tata kelola, efektivitas program, serta efisiensi pemanfaatan anggaran. Laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan perencanaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja semakin selaras dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

Selama Tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata tahun 2025 secara umum target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai bahkan ada dua IKK yaitu IKK.1.1 dan IKK.1.2 melampaui target yang telah ditetapkan dengan rangkuman sebagai berikut :

Tabel 34. Capaian IKK.1.1 dan IKK.1.2 melampaui target

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
SK.1	Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36	23,14	103%
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	787	107%
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi/Kebijakan	2	2	100%
SK.2	Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata				
IKK 2.1	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	A	100%
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

Realisasi anggaran 2025



Gambar 32. Realisasi Anggaran 2025

Pada Tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Laporan Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2024. Menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. IKK 1.1 presentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Target 23,66 % dengan capaian kinerja 23,14% atau 113%. Alokasi Anggaran Rp 20.727.725.000 dengan realisasi anggaran Rp 20.727.725.000 (100%)
2. IKK 1.2 Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan. Target 733 Lembaga dengan capaian kinerja 780 Lembaga atau 103%. Alokasi Anggaran Rp 2.630.558.000 dengan realisasi anggaran Rp 2.630.558.(100%)
3. IKK 1.3 Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja (rekomendasi kebijakan). Target kinerja 2 model dengan capaian kinerja 2 model atau 100%. Alokasi Anggaran Rp 173.455.000 Dengan realisasi anggaran Rp 173.455.000 (100%).
4. IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata dengan target predikat **A** terealisasi capaian kinerja predikat **A** atau 100%.
5. IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata. Target kinerja nilai NKA **sangat Baik** Realisasi capaian kinerja NKA **sangat baik (100%)**

Laporan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025 ini merupakan perwujudan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Hingga akhir Tahun 2025, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Pencapaian realisasi kinerja Tahun 2025 kiranya menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja tahun berikutnya.
2. Koordinasi internal antar unit terkait untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan anggaran.
3. Koordinasi yang baik antara Pusat dan Daerah serta seluruh stakeholder yang terlibat.
4. Perlu adanya perencanaan anggaran dan kegiatan yang baik untuk dapat menunjang ketercapaian kinerja dan anggaran dengan memanfaatkan efisiensi anggaran.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pada tahun berikutnya, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata telah menetapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Upaya peningkatan tersebut difokuskan pada penguatan perencanaan, optimalisasi proses bisnis, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Beberapa fokus perbaikan yang dapat diusulkan baik bagi organisasi internal dan eksternal untuk Tahun akan datang untuk di lakukan antara lain :

1. Unit-unit terkait saling berkoordinasi secara regular dan saling berkomitmen pada rekomendasi-rekomendasi perbaikan baik ditingkat internal satuan kerja maupun tingkat eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Bagi unit utama agar regulasi dapat disiapkan sebelum tahun berjalan agar pelaksanaan di tahun berjalan dapat direncanakan dengan baik untuk memperoleh hasil maksimal dalam pelaksanaan dengan rentang waktu yang ideal.
3. Adanya upaya lebih memfokuskan pada pelatihan keterampilan (praktek) dengan para ahli di bidangnya karena siswa SMK hampir 70% fokus kepada keterampilan, jika hanya fokus ke teori saja tidak akan memenuhi kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan DUDI.
4. Agar di perbanyak lagi pelatihan untuk guru, khususnya pelatihan pedagogik.
5. Revisi Anggaran terkait perubahan kebijakan pada tingkat unit utama diharapkan dicermati agar dapat menunjang penilaian indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di satker.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan
Khusus

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nana Halim
Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 29 Juli 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin


Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan
Pariwisata
Nana Halim

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2366
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp44.438.621.000
2	7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp43.132.617.000
Total Anggaran			Rp87.571.238.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
 Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
 Layanan Khusus
 Tatang Muttaqin

Depok, 29 Juli 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan
 Pariwisata
 Nana Halim

Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)



**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nana Halim
Jabatan : Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Depok, 15 Desember 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan
Pariwisata
Nana Halim

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi	[IKK 1.1] Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Persen	22,36
	[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi yang meningkat mutunya	Lembaga	733
	[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi hasil kerja sama mitra dunia kerja yang diterapkan oleh satuan pendidikan vokasi	Model	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp44.438.621.000
2	7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp46.165.493.000
Total Anggaran			Rp90.604.114.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
 Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
 Layanan Khusus
 Tatang Muttaqin

Depok, 15 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan
 Pariwisata
 Nana Halim

Lampiran 3: Rencana Aksi Tahun 2025



Rencana Aksi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025

Rencana Aksi Kinerja

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Triwulan			
			I	II	III	IV
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi						
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	2366	0	567	1799	2366
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	0	0	300	733
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	0	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	Predikat	A	-	-	-	A

Rencana Aksi Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
1	[DL.7623.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	2	0	Rp252.773.000

No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
2	[DL.7623.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	0	0	16	0	Rp490.459.000
3	[DL.7623.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	733	0	0	300	433	Rp4.903.076.000
4	[DL.7623.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	1	0	0	0	1	Rp4.291.720.000
5	[DL.7623.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	809	0	0	0	809	Rp4.041.858.000
6	[DL.7623.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	1518	0	528	990	0	Rp28.495.522.000
7	[DL.7623.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	39	0	39	0	0	Rp657.209.000
8	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	4	0	2	0	2	Rp40.000.000
9	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	0	0	1	Rp2.575.880.000
10	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	1	Rp41.822.741.000
Total Anggaran								Rp87.571.238.000

Depok, 13 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
 Nana Halim

Lampiran 4: Laporan Kinerja Triwulan 1



Laporan Kinerja Triwulan 1 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2366	Orang	0	60
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	733	Lembaga	0	0
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	100
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	A	Predikat	-	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan

1. Pada TW 1 kegiatan tahap penyusunan Modul Pembelajaran Pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan industri dan Kurikulum Pembelajaran Mendalam

2. Penyusunan Struktur Program pelaksanaan pelatihan Upskilling disesuaikan terkait efisiensi anggaran
3. Persiapan LMS Ruang GTK untuk pelatihan Upskilling Tahun 2025
4. Pengumpulan dan pengolahan Data Calon Peserta Upskilling
5. Pembukaan Pendaftaran Peserta Upskilling Anl 1
6. Rakor Daring dengan Kepala sekolah calon peserta upre skilling Anl.1 terkait penyampaian struktur program upskilling dalam efisiensi anggaran
7. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang (PNBP)

Kendala/Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Upskilling Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum dapat dilaksanakan masih dalam tahap Persiapan dikarenakan Instruksi Presiden Nomor .1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
2. Guru Kejuruan yang mendaftar untuk mengikuti Upskilling tidak maksimal karena dengan efisiensi anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

1. tetap Melakukan persiapan awal seperti pemetaan data calon peserta pelatihan , Penyusunan Modul pelatihan, Persiapan LMS Pelatihan
2. Menyusun strategi pelaksanaan pelatihan di masa efisiensi anggaran agar kegiatan pelatihan tetap berjalan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress/Kegiatan

1. Pemetaan Satuan Pendidikan yang akan dilakukan Pendampingan mutu Pendidikan
2. Menyusun Strategi pelaksanaan Penjaminan Mutu satuan Pendidikan wilayah Binaan provinsi Kalimantan dan DKI Jakarta
3. Penyusunan draf Pedoman Kegiatan Pendampingan satuan pendidikan
4. Review Instrumen Pendampingan Mutu Pendidikan

Kendala/Permasalahan

1. Juknis dari Eselon 1 terbit di TW 3 sehingga Pelaksanaan Kegiatan Paling Cepat di TW 3 atau TW 4
2. Sasaran Satuan Pendidikan yang mutunya dipetakan wilayah Kalimantan dan DKI Jakarta pada umumnya

sudah semua dilaksanakan, sehingga menjadi Kendala untuk mencari satuan pendidikan yang belum dapat pendampingan penjaminan Mutu

Strategi/Tindak Lanjut

1. Tetap Mempersiapkan Struktur Program, strategi pelaksanaan kegiatan dan Pedoman dengan Menggunakan Juknis dari tahun sebelumnya
2. Memetakan Satuan pendidikan yang belum atau masih perlu dilakukan pendampingan
3. Mengadakan Rapat koordinasi dengan satuan Dinas Pendidikan Propinsi untuk menggali data satuan pendidikan

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan

1. Rapat Persiapan Penyusunan model Inovasi Pembelajaran tahun 2025
2. Penetapan tim Inobel tahun 2025
3. Rapat Pemilihan Jenis Model Inovasi Pembelajaran

Kendala/Permasalahan

Anggaran masih terblokir Kebijakan Pemerintah sehingga Belum dapat dilaksanakan di Triwulan 1

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan Persiapan awal dengan rapat penetapan Tim Penyusun Model Pembelajaran, Pembahasan Jenis Model Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan terkini.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Rencana Penarikan Dana TW 1
2. Penyusunan jadwal pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025
3. Rapat persiapan pelaksanaan Program/Kegiatan dari TW 1 sampai TW 4 untuk penyesuaian RPD
4. Pelaksanaan Realisasi RO Dukungan Manajemen termasuk Belanja Pegawai

Kendala/Permasalahan

1. Anggaran masih dalam Blokir A (Kebijakan Pemerintah)
2. Rencana Penarikan Dana tidak sesuai dengan realisasi Penarikan dikarenakan Komponen terblokir sehingga mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penarikan Dana disesuaikan dengan rencana Penarikan Dana
2. Prioritas Kegiatan yang sebagai Prioritas Nasional

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A

Progress/Kegiatan

1. Finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2024
2. Update SK Tim Evaluasi SAKIP, Penyusunan LAKIN tahun 2025 dan SK tim Review LAKIN
3. Menyusun tindak lanjut LHE tahun 2024

Kendala/Permasalahan

1. Renstra 2025-2029 masih dalam proses penyusunan
2. Perjanjian Kinerja Menunggu Renstra ditetapkan
3. Rencana Aksi menunggu Perjanjian Kinerja Ditetapkan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menggunakan Draft renstra untuk sementara sebagai acuan Penetapan IKU
2. Menggunakan DIPA 0 sebagai acuan Penyusunan draf PK awal
3. Menggunakan PK Awal Sebagai acuan Penyusunan Rencana aksi

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DL.7623.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	0	1	Rp252.773.000	Rp81.560.000	32.27
2	[DL.7623.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	0	0	Rp490.459.000	Rp159.514.000	32.52

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DL.7623.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	0	0	Rp4.903.076.000	Rp162.410.400	3.31
4	[DL.7623.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BB BPPMPV	Paket	0	0	Rp4.291.720.000	Rp2.484.838.900	57.90
5	[DL.7623.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	0	622	Rp4.041.858.000	Rp209.755.000	5.19
6	[DL.7623.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	0	948	Rp28.495.522.000	Rp10.747.791.800	37.72
7	[DL.7623.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	0	39	Rp657.209.000	Rp398.570.000	60.65
8	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	2	Rp40.000.000	Rp10.000.000	25.00
9	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.575.880.000	Rp624.167.000	24.23
10	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp41.822.741.000	Rp28.482.222.145	68.10
Total Anggaran					Rp87.571.238.000	Rp43.360.829.245	49.51

D. Rekomendasi Pimpinan

Rekomendasi IKK 1.1 : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

1. Koordinasi dengan Eselon 1 (sesditjen Pendidikan Vokasi PK dan PLK) untuk pengajuan Relaksasi anggaran
2. Memulai Pelaksanaan Persiapan, Pemetaan, Pengolahan Data, Penyusunan Struktur Program Kegiatan yang akan dilaksanakan

Rekomendasi IKK 1.2 : Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

1. Petakan satuan Pendidikan yang akan dilakukan Pendampingan
2. Gunakan Juknis tahun sebelumnya sebagai pedoman awal penyusunan struktur program

Rekomendasi IKK 1.3 : Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja.

model Pembelajaran yang akan ditetapkan ditahun 2025 disesuaikan dengan kebijakan Kurikulum Pembelajaran Mendalam sehingga tetap searah dengan kebutuhan Industri dan satuan Pendidikan

Rekomendasi IKK 2.1 : Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Pejaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

Target Predikat SAKIP A dengan kenaikan skor dari tahun sebelumnya.

Rekomendasi IKK 2.2 : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata.

Target Nilai Kinerja Anggaran sangat baik dengan mendapat nilai skor lebih baik dari tahun sebelumnya

Depok, 27 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Nana Halim
--	---

Lampiran 5: Laporan Kinerja Triwulan 2



Laporan Kinerja Triwulan 2 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2366	Orang	567	344
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	733	Lembaga	0	0
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	Rekomendasi Kebijakan	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	0
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	A	Predikat	-	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan

1. Pelaksanaan Kegiatan Upskilling guru kejuruan Ank.1 dengana target peserta 200 peserta, peserta yang hadir 179 Peserta dengan total target guru kejuruan yang mengikuti peningkatan kompetensi Upskilling

untuk tahun 2025 sejumlah 1175 persentase capaian 15%

2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi Instruktur LKP bidang Tata kecantikan dan Administrasi Profesional dengan jumlah peserta 39 dan hadir semua
3. Pelaksanaan Pelatihan Guru Umum Kejuruan matapelajaran Matematik, IPAS dan B.Ingggris dengan jumlah peserta 66 dan hadir semua
4. Rapat koordinasi Upskilling Guru kejuruan dengan 34 Dinas Pendidikan Propinsi , Pusat belajar dan DU/DI
4. Persiapan Upskilling Guru Kejuruan Ank 2.
5. Pembukaan Pendaftaran Peserta Upskilling Ank 2.
6. Persiapan Pelatihan Manjerial Kepala Sekolah
7. Persiapan Pelatihan Pembelajaran Mendalam (TOT calon fasilitator, TOT admin LMS) Bagi SMK ProPinsi DKI Jakarta

Kendala/Permasalahan

1. Anggaran perjadiin Masih blokir A sebesar 50% dari total pagu anggaran perjadiin pelatihan Upskilling sehingga sasaran terbatas dan pelaksanaan pelatihan upskilling disesuaikan dengan kondisi efisiensi

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan dengan strategi sharing budget dengan peserta yang di informasikan dilaman pendaftaran
2. Menyusun strategi pelaksanaan pelatihan yang efisiensi dan efektif di masa efisiensi anggaran agar kegiatan pelatihan tetap berjalan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress/Kegiatan

1. Pemetaan Satuan Pendidikan
2. Menyusun Strategi pelaksanaan Pnjaminan Mutu satuan Pendidikan wilayah Binaan propinsi Kalimantan dan DKI Jakarta
3. Penyusunan draf Pedoman Kegiatan

Kendala/Permasalahan

1. Juknis dari Eselon 1 terbit di TW 3 sehingga Pelaksanaan Kegiatan PALING Cepat di TW 3 atau TW 4
2. Sasaran Satuan Pendidikan yang mutunya dipetakan wilayah Kalimantan dan DKI Jakarta pada umumnya sudah semua dilaksanakan, sehingga menjadi Kendala untuk mencari satuan pendidikan yang belum dapat

pendampingan penjaminan Mutu

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mempersiapkan Struktur Program, strategi pelaksanaan kegiatan dan Pedoman Internal
2. Memetakan Satuan pendidikan yang belum atau masih perlu dilakukan pendampingan
3. Mengadakan Rapat koordinasi dengan satuan Dinas Pendidikan Propinsi untuk menggali data satuan pendidikan

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan 2 Model Pembelajaran (Pjbl 5.0 dan Blended learning berbasis Mikro learning dengan gamifikasi)
2. Rapat Daring dengan Stake holder (Industri dan Satuan Pendidikan)

Kendala/Permasalahan

Merumuskan Model Pembelajaran Pjbl 5.0 dan Blended learning yang tepat sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan Industri

Strategi/Tindak Lanjut

Perumusan model pembelajaran dengan mengundang narasumber ahli , pihak industri dan sekolah SMK Bisnis dan Pariwisata Dan menggunakan referensi referensi terkait 2 model Pembelajaran

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Draft PK Kepala
2. Penyusunan Draft Rencana Aksi
3. Penyusunan Tinjau LHE 2024

Kendala/Permasalahan

Renstra Kementerian Masih dalam Proses Penyusunan

Strategi/Tindak Lanjut

Penyusunan draf PK dan Rencana aksi berdasarkan DIPA 0 tahun 2025 dan memaksimalkan capaian kinerja

Menggunakan draf renstra sebagai acuan

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A

Progress/Kegiatan

1. Penyusunan Usul Relaksasi Anggaran
2. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) TW 2
3. Rapat persiapan pelaksanaan Program/Kegiatan dari TW 1 sampai TW 4 untuk penyesuaian RPD
4. Pelaksanaan Realisasi RO Dukungan Manajemen termasuk Belanja Pegawai

Kendala/Permasalahan

Kegiatan Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih dalam proses usul Revisi anggaran Relaksasi

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan Penarikan Dana sesuai dengan RPD yang telah disusun.dan yang tidak terkena blokir

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DL.7623.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	0	1	Rp252.773.000	Rp81.560.000	32.27
2	[DL.7623.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	0	0	Rp490.459.000	Rp159.514.000	32.52
3	[DL.7623.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	0	0	Rp4.903.076.000	Rp162.410.400	3.31

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
4	[DL.7623.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BB BPPMPV	Paket	0	0	Rp4.291.720.000	Rp2.484.838.900	57.90
5	[DL.7623.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselenggarakan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	0	622	Rp4.041.858.000	Rp209.755.000	5.19
6	[DL.7623.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	528	948	Rp28.495.522.000	Rp10.747.791.800	37.72
7	[DL.7623.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	39	39	Rp657.209.000	Rp398.570.000	60.65
8	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	2	2	Rp40.000.000	Rp10.000.000	25.00
9	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.575.880.000	Rp624.167.000	24.23
10	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp41.822.741.000	Rp28.482.222.145	68.10
Total Anggaran					Rp87.571.238.000	Rp43.360.829.245	49.51

D. Rekomendasi Pimpinan

Rekomendasi IKK 1. 1 : Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

- Kordinasi dengan eselon 1 untuk pengajuan usulan revisi relaksasi anggaran yang terblokir A
- Optimalkan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran mendalam SMK Propinsi DKI Jakarta dengan sharing anggaran
- segera Persiapan upskilling angkatan 2 dan 3 dengan memaksimalkan Anggaran yang ada

Rekomendasi IKK 1.2 : Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

- sebelum Juknis/Pedoman Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 diterbitkan gunakan pedoman/juknis tahun sebelumnya.

- **Persiapan pelaksanaan kegiatan Tracer studi dan ANBK di wilayah Binaan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata**

Rekomendasi IKK 1.3 : Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

1. Segera dilaksanakan penyusunan 2 model pembelajaran yang disesuaikan dengan Kurikulum Pembelajaran Mendalam dan Kebutuhan kurikulum Industri.
2. pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan efisiensi sebagai salah satu RO SBK

Rekomendasi IKK 2.1 : Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Pejaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian

- Target A dengan skor meningkat dari tahun sebelumnya

Rekomendasi IKK 2.2 : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

- dengan target sangat baik dan skor lebih baik dari tahun sebelumnya

Depok, 28 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Nana Halim

Lampiran 6: Laporan Kinerja Triwulan 3



Laporan Kinerja Triwulan 3 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2366	Orang	1799	1654
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	733	Lembaga	300	50
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	Rekomendasi Kebijakan	0	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	-	0
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	A	Predikat	-	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan

Telah dilaksanakan selama Triwulan III kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Pembelajaran Mendalam Guru SMK Propinsi DKI Jakarta dengan target peserta yang di panggil sebanyak 169 guru yang hadir mengikuti pelatihan 144 guru.



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

- Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah SMK wilayah Propinsi Kalimantan dan DKI Jakarta sebanyak 72 Kepala Sekolah , yang hadir mengikuti kegiatan sebanyak 68 Kepala Sekolah.
- Peningkatan Kompetensi Pengawas sekolah SMK sebanyak 49 peserta, yang dapat mengikuti kegiatan sebanyak 54 Peserta, ada penambahan peserta pengawas SMK untuk mengikuti kegiatan ini.
- Peningkatan Kompetensi Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan Bidang Bisnis dan Pariwisata sebanyak 855 Peserta
- Peningkatan Kompetensi Guru Umum Kejuruan sebanyak 66 Guru dan semua hadir mengikuti kegiatan.
- PNBP Pelatihan Guru SD,SMP, SMA,SMK dan Kepala Sekolah Kota tangerang sebanyak 467 peserta
-

Kendala/Permasalahan

untuk Kegiatan Upskilling Guru Kejuruan baru terlaksana mencapai target 855 peserta dari target 1175 masih kurang 275 peserta. untuk sisa peserta sebanyak 275 peserta yang belum terpanggil belum dapat dilaksanakan karena anggaran perjadiin masih dalam Blokir A (kebijakan Pemerintah).

Strategi/Tindak Lanjut

untuk target peserta Upskilling guru kejuruan SMK Bisnis dan Pariwisata yang belum dapat dilaksanakan kegiatan magang industri akan dilaksanakan smart training secara daring di bulan Nopember sehingga target capaian dapat terpenuhi.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi [IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress/Kegiatan

untuk Triwulan 3 pada RO Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan PTK Vokasi telah dilaksanakan sbb :

- Pendampingan Asesmen Nasional satuan pendidikan di Propinsi Kalimantan dan DKI Jakarta telah dilaksanakan di 15 satuan pendidikan
- Pelatihan Happy tanpa Bully untuk 25 SMK
- sosialisasi Tes Kemampuan Akademik terhadap Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk 10 Lembaga

Kendala/Permasalahan

Kegiatan Pemetaan mutu satuan pendidikan vokasi belum dilaksanakan di TW 3 dikarenakan masih menunggu Juknis terkait pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu Satuan pendidikan

Strategi/Tindak Lanjut

direncanakan akan dilaksanakan pada TW 4 dengan menggunakan Juknis tahun sebelumnya setelah berkoordinasi dengan eselon 1

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi [IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

pada TW 3 ini telah dilaksanakan sbb :

- a. persiapan penyusunan model dengan membentuk tim Inobel melibatkan industri, widyaiswara dan satuan pendidikan
- b. mengadakan Workshop penyusunan 2 inovasi model pembelajaran yaitu PJBL 5.0 dan Blended Learning berbasis Microlearning dengan Gamifikasi bersama Pihak industri dan 2 SMK
- c. Melaksanakan Pendampingan ke satuan pendidikan SMK Mitra Industri MM dan SMK metland untuk model pembelajaran PJBL 5.0 dan Blended Learning berbasis Microlearning dengan Gamifikasi
- d. Pembuatan konten video pembelajaran digital bersama pihak SMK sebagai digitalisasi model pembelajaran
- e. Sosialisasi 2 model pembelajaran ke 150 satuan pendidikan
- f. supervisi dan monitoring pelaksanaan 2 model pembelajaran di 2 SMK dalam implementasi praktek pembelajaran di ruang kelas.

Kendala/Permasalahan

Pemilihan model pembelajaran yang selaras dan link and match antara satuan pendidikan dan industri yang bisa diimplementasikan di sekolah.

Strategi/Tindak Lanjut

Duduk bersama antara Satuan Pendidikan dan Industri untuk menemukan rumusan model pembelajaran yang selaras di kedua belah pihak.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

sampai TW 3 Nilai kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata masuk dalam Kategori Baik, diusahakan samapi TW 4 akan memperoleh predikat sangat baik

Kendala/Permasalahan

masih terkendala dengan masih adanya Blokir A d sampai TW 3 ini dikarenakan kurrang maksimal dalam pelaksanaan kinerja karena sedikit banyak mempengaruhi belanja.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mempercepat Proses pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi daya serap anggaran
2. melaksanakan penarikan anggaran dengan maksimal sesuai dengan yang disusun dalam RPD .
3. Penyesuaian target dengan capaian



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A

Progress/Kegiatan

Persiapan Penilaian LHE mandiri dengan mempersiapkan dokumen Pendukung

Kendala/Permasalahan

RKT eselon 1 belu selesai sehingga satker belum bisa menyusun RKT satker

Strategi/Tindak Lanjut

sementara menyusun RKT sesuai dengan PK Kepala Balai

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DL.7623.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	Rp252.773.000	Rp173.453.000	68.62
2	[DL.7623.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	Rp490.459.000	Rp224.314.000	45.74
3	[DL.7623.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	300	26	Rp4.903.076.000	Rp1.202.570.000	24.53
4	[DL.7623.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BB BPPMPV	Paket	0	0	Rp4.291.720.000	Rp3.324.064.898	77.45
5	[DL.7623.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	0	622	Rp4.041.858.000	Rp785.195.000	19.43



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
6	[DL.7623.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	1518	1426	Rp28.495.522.000	Rp13.398.002.000	47.02
7	[DL.7623.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	39	39	Rp657.209.000	Rp398.570.000	60.65
8	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	2	2	Rp40.000.000	Rp29.500.000	73.75
9	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.575.880.000	Rp906.878.000	35.21
10	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp41.822.741.000	Rp31.771.002.676	75.97
Total Anggaran					Rp87.571.238.000	Rp52.213.549.574	59.62

D. Rekomendasi Pimpinan

- Tetap laksanakan Kegiatan walau masih ada kendala Blokir A dalam Anggaran susun strategi untuk tetap mencapai target capaian dan tetap terlaksanakan setiap RO
- terus berkoordinasi dengan eselon 1 terkait Juknis, pedoman atau Peraturan baru agar kegiatan berjalan tetap berpedoman dengan juknis dan pedoman
- lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan jangan menumpuk dibelakang, laksanakan kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan berbagai strategi dan metode

Depok, 6 Oktober 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata
 Nana Halim



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran 7: Laporan Kinerja Triwulan 4



Laporan Kinerja Triwulan 4 Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi				
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	2366	Orang	2366	2.646
[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	733	Lembaga	733	754
[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	2	Rekomendasi Kebijakan	2	2
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi
[IKK 1.1] Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja

Progress/Kegiatan

RO.SCI 001 :

Seluruh rangkaian kegiatan Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja telah selesai dilaksanakan di bulan Desember, kegiatan Pelatihan di mulai



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

dari Bulan Juli dengan rangkaian kegiatan IN1, OJT 1, OJT 2, OJT 3 dan IN 2. Pelatihan diikuti oleh Guru SMK Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

RO.SCI.002

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Terdiri dari :

1. Pelatihan Upskilling Kepala Sekolah SMK Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan selesai dilaksanakan di bulan Agustus TW 2
2. Pelatihan Upskilling Pengawas SMK Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan selesai dilaksanakan di bulan September TW 2.
3. Peningkatan Kompetensi Guru Kejuruan Bisnis dan Pariwisata Upskilling dan Reskilling terbagi dengan 4 Angkatan yaitu :
 1. Angkatan 1 selesai dilaksanakan di Bulan Juli TW 2
 2. Angkatan 2 selesai dilaksanakan Di bulan Agustus TW 2
 3. Angkatan 3 selesai dilakasankan di bulan September TW 2
 4. Angkatan 4 selesai dilakasankan di bulan Nopember TW 4 secara daring
4. Peningkatan Kompetensi Guru Umum Kejuruan yang dilaksanakan di bulan Juni 2025 TW 2

SCI.004

Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Di bulan Juni TW 2 untuk Bidang Keahlian Adminitrasi Perkantoran dan Akutansi. Semua peserta yang dipanggil mengikuti Pelatihan hadir sesuai jumlah panggilan.

Kendala/Permasalahan

SCI.001 : Masih banyak SMK swasta di Propinsi DKI Jakarta dan Kalimantan yang belum mendapat pelatihan Pembelajaran mendalam karena tidak mendapat Batuan Operasional Sekolah Kinerja sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelatihan.

SCI.002 : Anggaran untuk Kegiatan Upskling Guru kejuruan sampai TW 4 masih dalam Blokir A, sehingga untuk Capaian output upskling guru kejuruan Angkatan 4 dengan sisa target 275 peserta guru tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

SCI.001 : BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA mendata SMK Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur yang guru gurunya belum mendapat pelatihan Pembelajaran Mendalam, sehingga BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Menagadakan Pelatihan Pembelajaran Mendalam dengan Biaya APBN untuk wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur .

SCI.002 : untuk Upskilling Guru kejuruan Angkatan 4 dapat dilaksanakan Pelatihan daring terlebih dahulu di bulan Nopember dengan jumlah peserta 275, pelaksanaan Magang Industrinya dilaksanakan di tahun anggaran 2026 .

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[IKK 1.2] Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan

Progress/Kegiatan

Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pendidikan Vokasi dengan mutu yang terpetakan selesai dilaksanakan di bulan desember, Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di TW 4 dimulai dengan Sosialisasi kepada dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta dan Kalimantan, Sosialisasi Dengan Satuan Pendidikan Propinsi DKI Jakarta dan Kalimantan, Penyusunan Instrumen, Pelatihan daring Ke 733 lembaga/satuan pendidikan dengan 2 kali pertemuan 4 JP setiap pertemuannya, Pendampingan luring ke 40 Satuan Pendidikan dan Monitoring evaluasi ke 25 satuan pendidikan.

Kendala/Permasalahan

1. Pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan di TW dikarenakan menunggu adanya Juknis terbaru dari eselon 1 terkait Penjaminan Mutu.
2. Pendampingan luring yang dilaksanakan hanya 40 Lembaga dikarenakan Anggaran kegiatan ini masih dalam Blokir A sehingga kurang maksimal untuk pendampingan secara luring minimal 50% dari jumlah seluruh target sejumlah 733 lembaga

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menggunakan Juknis tahun sebelumnya agar kegiatan tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perkembangan perkembangan baru.
2. Memaksimalkan Pendampingan secara daring yang dapat menyentuh 733 lembaga agar 733 lembaga dapat maksimal mendapat informasi dan pendampingan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi

[IKK 1.3] Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja

Progress/Kegiatan

Seluruh Rangkaian Kegiatan Mulai dari Wokshop Penyusunan 2 Model Pembelajaran, Pendampingan Ke 2 SMK sebagai project 2 model pembelajaran , Sosialisasi 2 Model Pembelajaran ke 200 SMK secara daring dan Monitoring evaluasi ke 2 SMK project 2 model pembelajaran telah dilaksanakan di TW 3

Kendala/Permasalahan

sebagian Anggaran dalam Blokir A

Strategi/Tindak Lanjut

Walau anggaran masih dalam Blokir A maksimal kegiatan tetap dilaksanakan tanpa mengurangi target dan kualitas kegiatan

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata dengan kategori Sangat Baik

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil dari Aplikasi Monev Kemenkeu capaian Nilai Kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata per



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E.



tanggal 19 Desember 2025 sebesar 91.73 sudah mencapai predikat Sangat Baik dan kemungkinan Nilai akan beratamabah hinggara akhir tahun 2025 dikarenakan masih ada pergerakan dalam perhingannya.

Kendala/Permasalahan

dengan adanya Blokir A agak menghambat rangkaian kegiatan yang harus diatur ulang penjadwalan kegiatan yang mungin dapat meleset dari RPD yang telah direncanakan, seperti Di TW 2 yang sudah direncanakan adanya penarikan Dana ternyata revisi relaksasi anggaran baru selesai di akhir TW 2, sehingga niali RPD tidak Maksimal.

Strategi/Tindak Lanjut

untuk TW 2,3 dan 4 di maksimalkan penarikan dana sesuai dengan RPD yang direncanakan, Percepatan pelaksanaan kegiatan, maksimal kan RO SBK

[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata minimal A

Progress/Kegiatan

Penilaian Evaluasi Kinerja Tahun 2025 mendapatkan nilai 88 naik 0.5 dari penilaian evaluasi Kinerja tahun 2024

Kendala/Permasalahan

kurang maksimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan baik secara sistimatis dan secara dokumen pendukung,

Strategi/Tindak Lanjut

tingkatkan kordinasi antar unitkerja internal dan maksimalkan dokumen dokumen pendukung

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DL.7623.PBH.001] Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi Kebijakan	2	2	Rp252.773.000	Rp173.453.000	68.62
2	[DL.7623.PEC.001] Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	16	16	Rp490.459.000	Rp236.814.000	48.28



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DL.7623.QDB.001] Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	733	754	Rp4.903.076.000	Rp2.630.558.000	53.65
4	[DL.7623.RAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran BB BPPMPV	Paket	1	1	Rp4.291.720.000	Rp4.291.396.894	99.99
5	[DL.7623.SCI.001] Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	809	811	Rp4.041.858.000	Rp2.256.961.000	55.84
6	[DL.7623.SCI.002] Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	1518	1835	Rp31.528.398.000	Rp18.030.076.000	57.19
7	[DL.7623.SCI.004] Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	Orang	39	39	Rp657.209.000	Rp398.570.000	60.65
8	[WA.7574.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	4	5	Rp40.000.000	Rp40.000.000	100.00
9	[WA.7574.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp2.575.880.000	Rp1.986.602.000	77.12
10	[WA.7574.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp41.822.741.000	Rp41.152.234.830	98.40
Total Anggaran					Rp90.604.114.000	Rp71.196.665.724	78.58

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Diakhir Tahun Anggaran 2025 mohon segera Lakasanakan Penihilan TUP dan UP
2. dan Segera setor pengembalian ke kas Negara Jika ada sisa anggaran.
2. Lakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan baik kendala atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Hasil evaluasi jadi kan bahan sebagai peningkatan kinerja di tahun 2026 agar kinerja lembaga meningkat jauh lebih baik.



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Untuk Kinerja anggaran lakukan juga evaluasi, upayakan untuk tahun 2026 perhatikan RPD dengan penarikan agar RPD optimal penarikannya.

Depok, 19 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata

Nana Halim



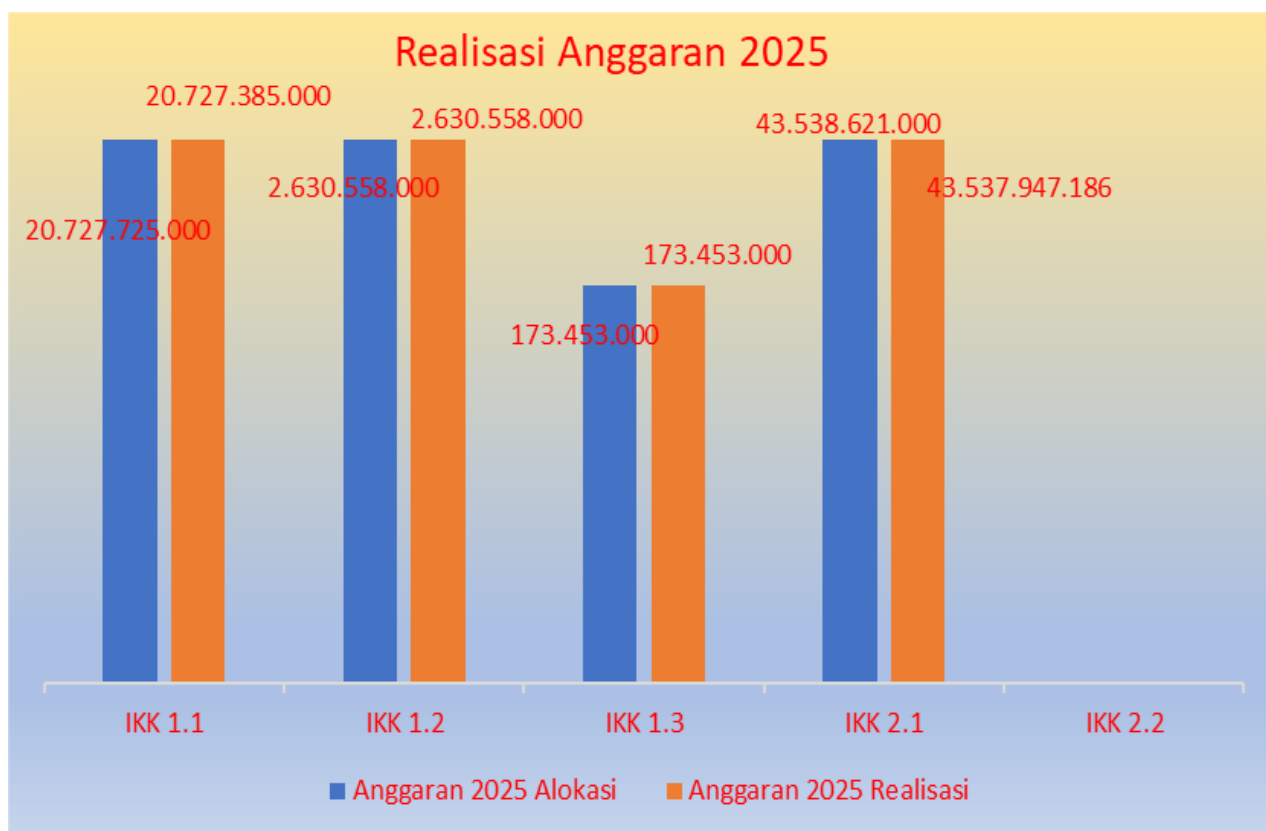
Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	%
SK.1 Meningkatnya mutu Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan vokasi					
IKK 1.1	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan vokasi yang mengikuti peningkatan kapasitas yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja	%	22,36	23,14	103
IKK 1.2	Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan mutu yang terpetakan	Lembaga	733	787	107
IKK 1.3	Jumlah model pembelajaran vokasi yang dikembangkan dengan mitra dunia kerja	Rekomendasi/Model	2	2	100
SK.2 Meningkatnya tata kelola Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis					
IKK 2.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Nilai	Sangat Baik	sangat baik	100
IKK 2.2	Predikat SAKIP Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata	Predikat	A	A	100



Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒

Pernyataan		Check List
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana strategis	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BBPPMPV BISNIS DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu laporan kinerja BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Depok, 26 Januari 2026
Ketua SPI,



Nanang Rukmana
NIP.19740612001121004



Kemendikdasmen
BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata



bbppmpvbispar.kemdikbud



bbppmpvbispar.kemendikdasmen



bbppmpv_bispar



bbppmpv_bispar



bbppmpv_bispar



0878 8989 2223
(chat only)

bbppmpvbispar.kemendikdasmen.go.id